

SKRIPSI

**UPAYA INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI
MYANMAR**



FERA ANGRANI

1310521013

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2017

SKRIPSI

UPAYA INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN DEMOKRASI DI MYANMAR

Disusun dan diajukan oleh

FERA ANGRIANI
1310521013

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 21 Agustus 2017

Pembimbing



Kardina, S.IP., M.A.

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Andri Meganingratna, S.IP., M.Si.

SKRIPSI

UPAYA INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI MYANMAR

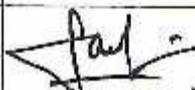
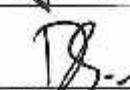
disusun dan diajukan oleh

FERA ANGRANI
1310521013

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 07 September 2017 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dede Rohman, S.IP., M.Si	Ketua	
2.	Kardina, S.IP., MA	Sekretaris	
3.	Claudia Conchita Renyoet, S.IP., MA	Anggota	
4.	Achmad, S.IP., M.Si	Anggota	

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


Andi Meganingratna, S.IP., M.Si
UNIVERSITAS FAJAR

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Fera Angriani

NIM : 1310521013

program studi : Hubungan Internasional

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul 'Upaya Indonesia dalam Perkembangan Demokrasi di Myanmar' adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 30 September 2017

Yang Membuat Pernyataan,

A 6000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text 'METRAI SURVEIL', the serial number 'CA02DAEF672991672', and the denomination '6000 ENAM RIBU RUPIAH'.

Fera Angriani

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Fajar Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penelitian ini. Maka melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Ibu Andi Meganingratna, S.IP., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Fajar Makassar. Kepada Ibu Kardina S.IP., MA. sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini. Serta kepada para dosen HI Universitas Fajar (Bapak Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I, Bapak Dede Rohman, S.IP.,M.Si, Bapak Achmad, S.IP., M.Si, dan Ibu Claudia Conchita Renyoet, S.IP., MA) yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih setinggi-tingginya juga penulis ucapkan kepada kedua orang tua dan keluarga saya atas bantuan, nasehat, dan motivasi selama ini Serta kepada teman-teman yang juga memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga pihak-pihak yang disebutkan diatas mendapatkan kebaikan dari-NYA atas bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis sendiri. Maka untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran

dari pembaca yang bersifat membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Serta semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri.

Makassar, 15 Agustus 2017

Penulis

ABSTRAK

Upaya Indonesia dalam Pengembangan Demokrasi di Myanmar

Fera Angriani
Kardina

Myanmar merupakan salah satu negara yang pernah dipimpin oleh junta militer yang diktator dan otoriter selama 50 tahun, namun saat ini sedang menjalani proses transisi menuju demokrasi. Dalam membantu proses transisi demokrasi di Myanmar, terdapat upaya-upaya diplomatis yang dilakukan oleh Indonesia. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bentuk upaya yang dilakukan Indonesia dalam pengembangan demokrasi di Myanmar. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah diplomasi multi jalur dan institusionalisme.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh Indonesia yaitu melalui *Bali Democracy Forum* (BDF) dan *Institute for Peace and Democracy* (IPD). Peran Indonesia dalam pengembangan demokrasi di Myanmar menggunakan diplomasi multi jalur serta mendirikan sebuah institusi yang bekerjasama dengan Myanmar untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan isu demokrasi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh IPD bertujuan untuk memberikan dukungan serta membantu dalam mendorong perkembangan demokrasi di Myanmar.

Kata Kunci: Demokrasi, *Bali Democracy Forum* (BDF), *Institute for Peace and Democracy* (IPD)

ABSTRACT

The Efforts of Indonesia in Developing Democracy in Myanmar

Fera Angriani
Kardina

Myanmar is one of the countries which had been led by a dictatorial and authoritarian military junta for 50 years but is currently undergoing a process of transition to democracy. Indonesia has performed some diplomatic efforts in order to help the democratic transition process. So, this research aims to find out kinds of effort performed by Indonesia in development of democracy in Myanmar. The perspectives used in this study were multi-track diplomacy and institutionalism.

The result of this research shows that there were some performed by Indonesia through Bali Democracy Forum (BDF) and Institute for Peace and Democracy (IPD). The role of Indonesia in development of democracy in Myanmar was through multi-track diplomacy and also established an institution in collaboration with Myanmar to promote various activities regarding to democracy issues. The activities performed by IPD aimed to support and to foster the development of democracy in Myanmar.

Key words: Democracy, Bali Democracy Forum (BDF), Institute for Peace and Democracy (IPD)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penulisan	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II Tinjauan Pustaka.....	12
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	12
2.1.1 <i>Multi-track Diplomacy</i>	12
2.1.2 Institusionalisme.....	16
2.2 Tinjauan Empirik	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III Metode Penelitian	33
3.1 Rancangan Penelitian.....	33
3.2 Kehadiran Peneliti.....	34
3.3 Lokasi Penelitian.....	35
3.4 Sumber Data.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
3.7 Pengecekan Validitas Temuan.....	38
3.8 Tahap-tahap Penelitian.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Upaya Diplomasi Indonesia dalam Perkembangan Demokrasi di Myanmar.....	41

4.1.1 Menyelenggarakan <i>Bali Democracy Forum</i> (BDF)	47
4.1.2 Membentuk <i>Institute for Peace and Democracy</i> (IPD)	63
4.2 Pengaruh <i>Institute for Peace and Democracy</i> (IPD) dalam Proses Demokratisasi di Myanmar	72
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
2.1 Alur Kerangka Pemikiran.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Pelaksanaan Kegiatan BDF	50
4.2 Keanggotaan IPD	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan negara dimana kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat sehingga segala keputusan yang diambil oleh negara berasal dari aspirasi rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan pemilu yang dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 29 September 1955 dan masih terus dilaksanakan hingga sekarang.¹ Pemilihan umum adalah salah satu upaya demokrasi yang dilakukan dengan memberikan kebebasan dan hak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang dinginkannya dan ini menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis. Pemilu merupakan salah satu penerapan nilai demokrasi yang terlaksana dengan baik di Indonesia.

Indonesia sebagai sebuah bangsa besar sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengenal demokrasi, merdeka dan besar dengan demokrasi seharusnya menjadikan bangsa Indonesia memiliki pengalaman terhadap demokrasi. Proses demokrasi di Indonesia melakukan transisi dari berbagai model demokrasi, yang terhitung ada empat fase. Model demokrasi pada negara Indonesia dengan berbagai macam problem di dalamnya; pasca awal kemerdekaan periode demokrasi Parlementer 1945-1959, demokrasi Terpimpin periode 1959-1965, demokrasi Pancasila periode 1965-1998, dan demokrasi periode 1998 (Reformasi) hingga sekarang.²

¹ Fiska Friyanti. *Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional Indonesia*. <http://lib.unnes.ac.id/382/1/1092.pdf>. Diakses pada tanggal 9 September 2017.

² Eko Prasetyo. *Demokrasi dan Problem Kepemimpinan Politik di Indonesia*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24118/1/EKO%20PRASETYO.pdf>. Hal: 1-2. Diakses pada tanggal 10 April 2017.

Melihat perkembangan demokrasi Indonesia yang terus semakin berkembang dan semakin menerapkan nilai-nilai demokratis, maka tidak heran jika banyak negara-negara yang memuji sistem demokrasi di Indonesia dan hal tersebut juga membuat Indonesia ditetapkan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, memberikan pujian atas perkembangan demokrasi di Indonesia dengan menyatakan bahwa rakyat Indonesia telah menunjukkan komitmen mereka kepada demokrasi melalui kegiatan pemilihan Presiden tahun 2014 yang lalu.³ Sedangkan menurut *Consortium of Asian Democracy Index (CADI)* yang merupakan lembaga internasional yang mengukur kualitas demokrasi negara-negara Asia, menyebutkan bahwa Indonesia selalu mengalami perkembangan demokrasi setiap tahunnya dibandingkan negara-negara lain di Asia.⁴

Pada tahun 2011, CADI melakukan survey terhadap 3 negara Asia yaitu Indonesia, Korea Selatan dan Filipina. Skor indeks demokrasi menunjukkan diantara ketiga negara tersebut, Indonesia memiliki skor paling tinggi yaitu 4,99 sedangkan Korea Selatan 4,90 dan Filipina 4,7. Indonesia selalu mengalami perkembangan skor Indeks demokrasi setiap tahunnya. Pada tahun 2012, skor indeks demokrasi Indonesia yaitu 5,32. Tahun 2013 yaitu 4,97, 2014 yaitu 5,42 dan pada tahun 2015 yaitu 5,81. Sedangkan, dari segi kesetaraan skor Indonesia yaitu 4,50 lebih unggul dibandingkan Korea Selatan dan Filipina yang masing-masing memperoleh skor 4,31. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi Indonesia telah diakui dikancah internasional.⁵

³ Anonim. *Obama Puji Demokrasi Indonesia*. <http://www.dw.com/id/obama-puji-demokrasi-indonesia/a-17804884>. Diakses pada tanggal 19 April 2017.

⁴ Caroline Paskarina. *Politik Indeks dan Arah Perkembangan Demokrasi di Indonesia*. https://www.researchgate.net/publication/311225925_POLITIK_INDEKS_DAN_ARAH_PERKEMBANGAN_DEMOKRASI_DI_INDONESIA, Diakses pada tanggal 19 April 2017.

⁵ Anonim. *(De)Monopolisasi Demokrasi di Asia*. <http://www.puskapol.ui.ac.id/asian-democracy-index>. Diakses pada tanggal 27 September 2017.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki perkembangan demokrasi yang cepat serta mengalami perkembangan yang cukup besar. Namun, di Asia masih terdapat beberapa negara yang masih dalam transisi menuju demokrasi dan bahkan masih terdapat negara yang belum menganut ideologi demokrasi atau masih bersifat otoriter. Myanmar adalah salah satu negara di Asia yang saat ini mulai menerapkan nilai-nilai demokrasi dan terus berupaya untuk mengembangkan demokrasi di Myanmar.

Myanmar merupakan negara yang belum menjalankan pemerintahan demokratis di Asia Tenggara sampai tahun 2011 setelah diperintah oleh rezim junta militer Tatmadaw sejak tahun 1962. Pemerintahan militer Myanmar dimulai sejak kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win. Munculnya kekuatan militer dalam sistem politik Myanmar menggeser pelaksanaan sistem demokrasi parlementer yang telah diterapkan di Myanmar sejak kemerdekaannya dari Inggris tanggal 4 Januari 1948.⁶

U Nu merupakan Perdana Menteri pertama Myanmar. Dibawah pemerintahan sipil U Nu, ia menjalankan sebuah pemerintahan yang demokratis dengan menggunakan sistem parlementer. Namun, campur tangan militer sangat kuat. Terlihat pada saat Jenderal Ne Win ditugaskan untuk mengendalikan ketertiban dalam mempersiapkan pemilu tahun 1960. Pemerintahan militer saat itu berhasil menjalankan tugasnya untuk memulihkan keadaan dalam negeri sampai dengan terselenggaranya pemilu tahun 1960 yang dimenangkan oleh U Nu. Pihak militer kemudian memberikan ultimatum kepada pemerintah sipil, dengan memberikan waktu selama 2 tahun untuk menyelesaikan permasalahan-

⁶ Melisa Aprianti Arif. *Analisis Demokratisasi di Myanmar Tahun 2003-2011*. <http://scholar.unand.ac.id/8844/4/BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>, Diakses pada tanggal 28 April 2017.

permasalahn yang di hadapi Myanmar. Akan tetapi, pemerintah sipil mengalami kegagalan dalam menata kembali kondisi internal negeri Myanmar.⁷

Pada 2 Maret 1962, pihak militer melakukan kudeta dengan dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Kudeta tersebut merupakan awal dari kekuasaan junta militer yang menggantikan pemerintahan yang demokratis di Myanmar. Ne Win berkuasa selama 1962-1988, dengan hanya ada satu partai politik yang memegang kekuasaan, yaitu *Burmese Socialist Program Party* (BSPP) yang tentu saja dibentuknya sendiri dan keanggotaannya didominasi oleh kalangan militer. BSPP merupakan partai tunggal yang dilaksanakan untuk mendukung program sosialis dengan mayoritas anggota berasal dari golongan militer. Pada masa Ne Win, ia mendirikan pemerintahan otoriter dan memerintah dengan gaya diktator. Rakyat tidak memiliki hak pilih untuk menentukan pimpinannya sendiri, karena keputusan politik harus melalui pimpinan militer.⁸

Pemimpin berikutnya adalah Jenderal Saw Maung yang resmi menjabat pada 18 September 1988 setelah melakukan kudeta. Namun hal ini tak banyak memberikan perubahan, karena pemimpin yang baru masih menganut sikap otoriter. Hal ini hanya pergantian pemerintahan militer yang lama ke pemerintahan militer yang baru, partai yang semula berkuasa yaitu BSPP menjadi *State of Law and Order Restoration Council* (SLORC). Jenderal Saw Maung dengan segera kemudian membentuk sebuah komite khusus yang kemudian diikuti dengan pemilihan anggota parlemen.⁹

Pada tahun 1990, kembali diadakan pemilihan umum di Myanmar. Hasil pemilu pada 27 Mei 1990 tersebut memberikan kemenangan kepada pihak yang pro demokrasi, *National League for Democracy* (NLD) yang disebut juga

⁷ Adya Satya Puspiata. 2013. *Keikutsertaan Myanmar dalam Kegiatan Bali democracy forum (BDF)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal: 24. (online)

⁸ Ibid. Hal: 25.

⁹ Ibid. Hal: 26.

Liga Nasional untuk Demokrasi dibawah pimpinan Aung San Suu Kyi. Akan tetapi, pihak militer dibawah pimpinan Jenderal Saw Maung tidak mengakui dan membatalkan hasil pemilu tersebut. Kemudian tampuk pemerintahan Myanmar dipegang oleh Jenderal Than Shwe yang terkenal kejam dan sangat anti demokrasi. Junta militer sangat mengatur dan membatasi kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya rakyat Myanmar. Begitu kuatnya peran militer sehingga David I Steinberg menempatkan Myanmar sebagai *the most monolithically military-controlled in the world* (negara yang paling dikendalikan oleh militer secara monolitik yang ada di dunia)¹⁰

Kemudian pada tanggal 7 November 2011, Myanmar untuk pertama kalinya sejak 20 tahun terakhir kembali melaksanakan pemilu untuk memilih anggota parlemen. Pemilu pada tahun ini menghasilkan pemerintahan baru yang didominasi oleh sipil dan mulai mengurangi dominasi militer. Namun, masih ada larangan bagi warga yang berstatus atau pernah menjadi tahanan politik untuk mencalonkan diri menjadi kandidat anggota parlemen. Presiden Thein Sein yang ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya untuk melanjutkan kepemimpinan.¹¹

Pemilihan umum selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 1 April 2012. Pemilu ini dilakukan untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di parlemen. Kondisi Myanmar pada saat itu sudah banyak berbeda dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya. NLD bukan lagi satu-satunya partai oposisi yang ada, sebanyak 17 partai oposisi lainnya juga ikut serta dalam pemilu ini. pemerintah Myanmar juga memperbolehkan adanya pengamat asing yang terlibat dalam

¹⁰ Ibid. Hal: 27.

¹¹ Yolanda Utami Nilasari. 2014. *Proses Perubahan Politik di Myanmar: Menuju Demokrasi Melalui Pemilu*. Majalah Pengembangan Ilmu Sosial-FORUM Universitas Diponegoro, Volume 41 Nomor 1. Hal: 31.

pemilu ini. mereka mengizinkan sebanyak 100 orang wartawan mancanegara untuk datang dan meliput pemilu tersebut.¹²

Pemilu yang dilaksanakan oleh Myanmar menunjukkan bahwa Myanmar mulai membuka diri dan berkeinginan untuk menjadi negara yang demokratis. Sehingga dengan begitu, juga menyebabkan kerapuhan pada junta militer. Pelaksanaan pemilu serta kerapuhan junta militer di Myanmar disebabkan adanya tekanan dari dalam maupun luar negara Myanmar. Gelombang demonstrasi serta peran dari Aung San Suu Kyi dalam usaha memperkuat posisi rakyat bawah untuk melawan kediktatoran rezim militer dengan jalan menyuarakan ide-idenya mengenai demokrasi dan mendorong rakyat untuk lebih berani melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah yang tidak semestinya. Selain itu, Myanmar juga mendapatkan tekanan dari dunia internasional. Amerika Serikat memberlakukan sanksi keras berupa embargo ekonomi terhadap Myanmar dilihat dari berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan junta militer.¹³

Tekanan dari berbagai pihak yang ditujukan oleh Myanmar merupakan sebuah langkah dari pihak-pihak tertentu untuk menghentikan pemerintahan yang diktator serta otoriter di Myanmar dan dijadikan sebagai negara yang demokratis. Myanmar dan Indonesia termasuk negara-negara Asia namun perkembangan demokrasi di kedua negara tersebut berbeda. Indonesia lebih dulu menerapkan dan dapat dikatakan berhasil dalam menerapkan demokrasi di negaranya, dibandingkan dengan Myanmar.

Indonesia sendiri telah memiliki pengalaman dalam menerapkan sistem demokrasi. Hal tersebut terbukti dari berbagai fase yang telah dilalui oleh

¹² Ibid. Hal: 32.

¹³ Adya Satya Puspita. 2013. *Keikutsertaan Myanmar dalam Kegiatan Bali Democracy Forum (BDF)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal: 74. (Pdf)

Indonesia. Maka untuk itulah Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi, memiliki tanggung jawab untuk berbagi pengalaman dengan dunia internasional khususnya kepada negara-negara tetangga agar kiranya dapat menjadi contoh bagi negara lain.

Model demokrasi di Indonesia terdapat berbagai macam problem di dalamnya; pasca awal kemerdekaan periode demokrasi Parlementer 1945-1959, demokrasi Terpimpin periode 1959-1965, demokrasi Pancasila periode 1965-1998, dan demokrasi periode 1998 (Reformasi) hingga sekarang.¹⁴ Pada periode demokrasi Parlementer dan demokrasi Terpimpin dijalankan oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya model demokrasi Pancasila, Presiden Indonesia pada saat itu adalah Presiden Soeharto. Sedangkan pada era Reformasi diisi oleh beberapa Presiden Indonesia yang terpilih yaitu Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dan sekarang ini Joko Widodo.

Indonesia sebagai negara demokratis yang berusaha untuk terus berkembang memiliki kepentingan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan guna membahas masalah demokrasi. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah menyelenggarakan kegiatan *Bali Democracy Forum* (BDF). Ini merupakan forum internasional yang dilaksanakan oleh Indonesia di Bali guna membahas dan berdiskusi mengenai demokrasi. Ini juga merupakan sebuah cara bagi Indonesia sendiri yang sedang berupaya untuk lebih meningkatkan kehidupan bernegara yang lebih demokratis dengan melihat pengalaman dari negara-negara lainnya yang juga menganut paham demokrasi.

Pelaksanaan Bali Democracy Forum merupakan sebuah inisiatif dan inspirasi demokrasi yang dapat meningkatkan citra positif Indonesia sebagai

¹⁴ Eko Prasetyo. *Demokrasi dan Problem Kepemimpinan Politik di Indonesia*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24118/1/EKO%20PRASETYO.pdf>. Hal: 1-2. Diakses pada tanggal 20 September 2017.

negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, khususnya dalam pengembangan pengalaman dan *best practices* bagi demokrasi di kawasan Asia dan dapat dicermati bahwa ini sebagai keberhasilan strategi diplomasi Indonesia dalam mempromosikan dan mengembangkan demokrasi di Asia yang kemudian akan berdampak pada pengembangan demokrasi di dalam negeri.¹⁵ Melalui kegiatan ini, Indonesia dapat menanamkan pengaruhnya di kancah internasional.

BDF merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan sejak tahun 2008, dibawah naungan Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri.¹⁶ Setiap tahunnya Indonesia menyelenggarakan kegiatan forum internasional tersebut dengan mengusung sebuah tema yang berbeda setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan demokrasi saat ini serta membahas masalah-masalah global lainnya.

Sebagai sebuah forum pertemuan tahunan, BDF diikuti oleh perwakilan dari negara-negara, baik pemimpin pemerintahan, menteri, maupun tokoh-tokoh penting (*prominent figure*) yang inklusif, terbuka untuk semua negara baik yang telah menganut demokrasi ataupun yang berinspirasi untuk menjadi lebih demokratis. Forum ini juga berprinsip *homegrown democracy*, artinya berpatokan pada praktek-praktek nyata nilai-nilai demokrasi oleh negara peserta dengan tidak berpotensi untuk menyalahkan atau membenarkan praktek nyata tersebut.¹⁷

Kegiatan ini tidak hanya sampai pada menghadiri forum semata, tetapi sebagai tindak lanjut dari kegiatan BDF dibuatlah sebuah institusi internasional yaitu *The Institute for Peace and Democracy* (IPD) pada tahun 2008. IPD

¹⁵ Anonim. *Bali Democracy Forum*. <http://www.setneg.go.id>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2017.

¹⁶ Adya Satya Puspita. 2013. *Keikutsertaan Myanmar dalam Kegiatan Bali Democracy Forum (BDF)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal: 51. (Pdf)

¹⁷ Anonim. *Bali Democracy Forum*. <http://www.setneg.go.id>. Diakses pada tanggal 13 April 2017.

merupakan suatu lembaga yang bersifat independen dan non profit dan merupakan hasil inisiatif pemerintah Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan mempromosikan demokrasi serta dapat dicermati sebagai bagian dari peran politik luar negeri Indonesia untuk membentuk institusi internasional dan menyelenggarakan forum dengan mengundang negara – negara sahabat. Keberadaan IPD di Bali juga bertujuan untuk mendukung terwujudnya program-program dari BDF.¹⁸

Sebagai negara yang mencoba untuk menghapuskan pemerintahan yang otoriter untuk beralih ke pemerintahan yang bersifat demokrasi sangatlah tepat bagi Myanmar untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Indonesia seperti BDF. Dengan begitu Indonesia dengan negara lainnya seperti Myanmar dapat mengembangkan kehidupan bernegara yang lebih demokratis lagi. Melihat juga kenyataan bahwa Myanmar merupakan salah satu negara anggota ASEAN.

Melihat latar belakang diatas, maka untuk itulah penulis mengangkat sebuah judul skripsi yaitu '*Upaya Indonesia dalam Pengembangan Sistem Demokrasi di Myanmar*'. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam penyebaran isu demokrasi di tatanan internasional serta seberapa besar pengaruh dan efektifitas upaya Indonesia tersebut.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Berdasarkan judul skripsi ini yaitu, '*Upaya Indonesia dalam Pengembangan Demokrasi di Myanmar*', maka penelitian ini akan lebih fokus

¹⁸ *Institute for Peace and Democracy Refleksi Keajaiban Demokrasi Indonesia*. <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/42-januari-2009/232-institute-for-peace-anddemocracy-refleksi-keajaiban-demokrasi-indonesia.html>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2017.

untuk membahas upaya diplomatis Indonesia melalui kegiatan *Bali Democracy Forum* (BDF) serta terbentuknya sebuah institusi yaitu *Institute for Peace and Democracy* (IPD) dalam membangun proses demokratisasi di Myanmar.

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Bagaimana langkah diplomasi Indonesia untuk membangun demokrasi di Myanmar?
2. Bagaimana pengaruh *The Institute for Peace and Democracy* (IPD) sebagai hasil dari *Bali Democracy Forum* (BDF) terhadap demokratisasi di Myanmar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengembangkan sistem demokrasi di Myanmar melalui jalur diplomasi.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari *The Institute for Peace and Democracy* (IPD) dalam proses demokratisasi di Myanmar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Teori dan konsep dalam sebuah penelitian digunakan oleh peneliti untuk membedah masalah yang diangkat. Dalam skripsi ini penulis menggunakan konsep diplomasi multi jalur dan institusionalisme. Konsep ini penting digunakan oleh penulis untuk menganalisis proses diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam membangun sistem demokrasi di Myanmar.

Selain itu dengan menggunakan teori Institusionalisme yang berbicara mengenai sebuah peran sebuah lembaga institusi maka, dengan teori tersebut penulis dapat mengetahui peran dari IPD tersebut. Dengan begitu, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pengkaji diplomasi dan organisasi internasional mengenai peran diplomasi Indonesia di dunia internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam hal pemikiran maupun kebijakan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, maka Indonesia dapat memperkuat proses diplomasinya untuk menangani berbagai masalah internasional. Penelitian ini juga dapat menjadi sebuah ukuran bagi pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan BDF untuk mengukur keefektifan kegiatan tersebut serta dapat melihat sejauh mana peran dari *Institute for Peace and Democracy* (IPD) tersebut. Dengan begitu, pemerintah Indonesia juga semakin dapat mengembangkan perannya di kancah internasional dalam menjaga perdamaian dunia sesuai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Multi-track Diplomacy

Dalam buku yang berjudul *From Power Mediation to Dialogue Facilitation: Assessing The European Union's Approach to Multi-Track Diplomacy* karangan Veronique Dudouet, dan Matteo Dressler menjelaskan bahwa multi-track diplomacy atau diplomasi multijalur pertama kali diciptakan oleh Louise Diamond dan John W. McDonald. Dalam buku tersebut mereka menggambarkan diplomasi multijalur adalah kegiatan yang saling berhubungan antara individu dan lembaga yang bekerja sama untuk mencegah atau mengatasi konflik secara damai, terutama melalui dialog (langsung atau dimediasi) dan negosiasi. Konsep itu bersandar pada lensa sistemik untuk *peacebuilding* dan berfokus pada hubungan antara aktor yang berbeda dalam sebuah sistem. Ini menargetkan beberapa lapisan masyarakat dan pengambilan keputusan secara bersamaan, secara terkoneksi (atau paling terkoordinasi).¹

Menurut Louise Diamond dan John Mcdonald *multi-track diplomacy* adalah konsep diplomasi yang menjelaskan mengenai proses terjadinya perdamaian dalam sistem internasional melalui perpaduan dari diplomasi jalur pemerintah, diplomasi jalur kelompok, dan diplomasi jalur individu.² Diplomasi merupakan salah satu salah untuk mengatasi masalah yang terjadi antar negara. untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi antar negara bukan hanya menjadi tanggung jawab dari sebuah negara, tetapi aktor-aktor hubungan

¹ Dudouet Veronique dan Dressler Matteo. 2016. *From Power Mediation to Dialogue Facilitation: Assessing The European Union's Approach to Multi-Track Diplomacy*. (Jerman: Berghof Foundation). Hal: 10. (Pdf)

² Mahyar Diani. Skripsi. "*Strategi Multi Track Diplomacy Dalam Kerjasama Ekonomi Industri Korea Selatan (ROK) Terhadap Indonesia Tahun 2006-2012*".(Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah). Hal: 17.

internasional juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan internasional. Maka, diplomasi multijalur inilah yang merupakan sebuah cara penyelesaian masalah internasional dengan melibatkan berbagai aktor. Dengan begitu penyelesaian masalah internasional bisa ditempuh melalui berbagai jalur tanpa adanya peperangan atau konflik yang lebih besar.

Dalam pengertian yang hampir sama, *Multi-track diplomacy* diartikan juga sebagai cara konseptual untuk melihat proses perdamaian internasional dalam sebuah sistem. Dimana kegiatan yang dilakukan saling berhubungan oleh individu, lembaga, dan masyarakat yang beroperasi bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama sebuah dunia dalam perdamaian.³

Dalam diplomasi multijalur terdapat sembilan macam cara yang berbeda yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam hubungan internasional untuk berdiplomasi. Pada jalur pertama, pemerintah yang secara langsung berdiplomasi untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya jalur kedua, peranan non-pemerintah / profesional, atau penciptaan perdamaian melalui resolusi konflik. Kemudian, pada jalur ketiga, bisnis atau penciptaan perdamaian melalui perdagangan. Pada jalur 4, penciptaan perdamaian melalui keterlibatan personal. Jalur 5, merupakan pencapaian perdamaian melalui penelitian, pelatihan, dan pendidikan, atau perdamaian melalui *learning*. Jalur 6 yaitu penciptaan perdamaian melalui advokasi. Selanjutnya, jalur 7 agama atau penciptaan perdamaian melalui iman dalam tindakan. Lalu, jalur 8 pendanaan, atau penciptaan perdamaian melalui menyediakan sumber daya. Terakhir pada jalur 9 komunikasi dan media, atau penciptaan perdamaian melalui informasi.⁴

Masing-masing dari kesembilan jalur ini merepresentasikan atau menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Meskipun fungsi dan tugas

³ IMTD. *imtd.org/multi-track-diplomacy*. Diakses pada tanggal 19 April 2017.

⁴<http://imtd.org/multi-track-diplomacy>. Diakses pada tanggal 19 April 2017

aktor-aktor diplomasi berbeda-beda tetapi pada saat yang sama aktor-aktor tersebut satu sama lain akan terkait dan saling berinteraksi untuk membangun kerjasama yang sinergis. Untuk itu, *multi-track diplomacy* harus dilihat sebagai suatu sistem yang menyeluruh.⁵

Upaya Indonesia untuk membantu Myanmar dalam mengembangkan sistem demokrasi di negaranya adalah salah satu contoh penggunaan *multitrack diplomacy* Indonesia. Di Myanmar masih terjadi konflik seperti pembersihan etnis Rohingya dan sedang berusaha untuk terus mengembangkan demokrasi. Indonesia sebagai negara yang telah memiliki pengalaman dalam berdemokrasi memiliki tanggungjawab untuk berbagi pengalaman dengan Myanmar sekaligus membantu Myanmar untuk membangun demokrasi. Disinilah *multitrack diplomacy* ini digunakan, dimana Indonesia untuk membantu Myanmar dalam mengatasi konflik yang terjadi di negaranya terdapat beberapa cara yang dilakukan salah satunya adalah dengan melaksanakan *Bali Democracy Forum* (BDF). Kegiatan BDF ini merupakan kegiatan diplomasi Indonesia dengan menggunakan *multitrack diplomacy*, yang mana kegiatan BDF ini diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk membuat sebuah forum Internasional dengan mendatangkan delegasi dari negara lain termasuk Myanmar untuk sama-sama membahas masalah demokrasi.

Tindak lanjut dari kegiatan BDF ini adalah dengan terbentuknya sebuah institusi yaitu IPD. IPD sebagai lembaga yang menjalankan tugas dari BDF juga melaksanakan perannya dengan melakukan diplomasi kepada Myanmar dengan cara melakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan. Pada jalur 5 dijelaskan bahwa pencapaian perdamaian dapat dilakukan melalui *learning*, dan inilah yang dilakukan oleh IPD mengingat bahwa membangun demokrasi di

⁵ Sukawarsini Djelantik. 2004. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu). Hal. 64.

sebuah negara tidaklah mudah dan harus dipaksakan tetapi melalui pembelajaran-pembelajaran yang pada akhirnya bisa diterima oleh sebuah negara.

Dalam buku yang berjudul *Multi-Track diplomacy: A system Approach to Peace* karangan Louise Diamond dan John W. McDonald menjelaskan *track* kelima adalah penelitian atau pelatihan dan edukasi yakni perwujudan perdamaian melalui pembelajaran. Untuk ini terdapat tiga kajian didalamnya yaitu penelitian yang berhubungan dengan institusi pendidikan (sekolah, universitas), *think tanks* (berbagai penelitian, analisis, dan program studi) dan pusat penelitian kelompok yang berkepentingan khusus. Dengan kata lain ini adalah sebuah program pelatihan yang menyediakan keahlian praktisioner seperti negosiasi, mediasi, resolusi konflik, serta fasilitas *third-party* yang terdiri dari edukasi (pendidikan formal dari TK hingga program Doktoral) yang mencakup beragam aspek global tentang studi lintas-budaya, studi tata dunia dan perdamaian, konflik analisis, serta manajemen dan resolusi.⁶

Dijalur ini menekankan bahwa untuk menciptakan sebuah perdamaian dan menyelesaikan masalah-masalah internasional dapat ditempuh dengan cara melakukan kerjasama dalam hal pendidikan, penelitian, pelatihan serta melaksanakan forum-forum internasional. *Bali Democracy Forum* (BDF) adalah salah satu upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam membantu Myanmar dalam meningkatkan nilai-nilai demokratis di negaranya. BDF merupakan forum internasional yang diselenggarakan oleh Indonesia untuk mempromosikan demokrasi dengan mendatangkan delegasi-delegasi dari

⁶ Mochamad Arya Seta. *Multi-track Diplomacy*. Diakses dari http://mochamad-arya-seta-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-155925-SOH203%20Negosiasi%20dan%20Diplomasi-Multitrack%20Diplomasi.html. Pada tanggal 15 April 2017.

berbagai negara termasuk perwakilan dari negara Myanmar. Disinilah, Indonesia mempromosikan demokrasi serta bertukar pengalaman dengan negara lain.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan *Bali Democracy Forum* (BDF) ini, juga dibentuk *Institute for Peace and Democracy* (IPD). IPD merupakan sebuah organisasi internasional yang juga mempromosikan demokrasi serta membantu negara lain yang sedang ingin membangun sistem demokrasi. IPD bekerjasama dengan negara lain termasuk Myanmar dengan melakukan pertemuan, forum dan pelatihan yang bertujuan untuk berbagi pengalaman dengan Myanmar mengenai sistem demokrasi. Terbentuknya IPD ini merupakan contoh penggunaan diplomasi multijalur khususnya pada jalur 5 yaitu diplomasi penelitian, pelatihan dan pendidikan. Ini merupakan upaya Indonesia dengan menggunakan konsep dan cara seperti ini dapat membantu Myanmar dalam membangun proses demokrasi serta berkontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Myanmar.

2.1.2 Institusionalisme

Menurut John W. Meyer dan Brian Rowan, menulis tentang institusionalisme yaitu menjelaskan bahwa perilaku organisasi atau keputusan yang diambil oleh organisasi akan mempengaruhi institusi yang ada di luar organisasi. Organisasi akan menyesuaikan diri dengan tekanan dari luar untuk mempertahankan eksistensinya.⁷

Institusi berada pada lingkup struktur sosial, memiliki elemen-elemen simbolis, aktivitas-aktivitas sosial, dan sumberdaya material. Keberadaan institusi diperlukan sebagai seperangkat proses yang dicirikan dengan elemen-elemen

⁷ Wilson Rojeki Sidauruk. *Peran The Institute for Peace and Democracy (IPD) dalam Demokratisasi di Myanmar*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM), (Online), Volume 2 No.1. Hal: 4-5.

regulatif, dan kultural-kognitif yang sarat dengan perubahan. Meskipun unsur-unsur utama dari institusi adalah *rules, norms, and cultural benefit*.⁸

Kaum liberal institusional menyatakan bahwa institusi internasional menolong memajukan kerja sama di antara negara-negara. Untuk menilai kedalaman institusionalisasi terdapat tiga langkah disarankan yaitu:

1. Kebersamaan, derajat dimana harapan-harapan terhadap perilaku dan pemahaman yang tepat mengenai bagaimana menginterpretasikan tindakan dibagibersama oleh partisipan dalam sistem tersebut.
2. Kekhususan, derajat dimana harapan-harapan ini jelas khusus dalam bentuk aturan-aturan.
3. Otonom, perluasan dimana institusi dapat mengubah aturannya sendiri daripada tergantung pada abdan-badan dan agen-agen asing (yaitu negara) untuk melakukan hal tersebut.

Jelas bahwa analisis ruang lingkup dan kedalaman institusionalisasi secara menyeluruh diantara kelompok-kelompok negara adalah tugas penelitian yang substansial.⁹

Argumen yang dibuat oleh kaum liberal institusional adalah bahwa tingkat institusionalisasi yang tinggi secara signifikan mengurangi efek yang mengacaukan diri anarki multipolar yang ditunjukkan oleh Mearsheimer. Institusi-institusi dibuat karena tidak adanya kepercayaan diantara negara-negara. Mereka melakukan hal itu dengan memberikan aliran informasi diantara negara-negara anggotanya, sehingga setiap negara mempunyai informasi sedikit banyak tentang apa yang dilakukan negara lain dan mengapa. Dengan demikian, institusi-institusi itu membantu mengurangi rasa takut negara anggota satu sama

⁸ Ibid. Hal: 5.

⁹ Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2012. *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Hal: 193-194.

lain. selain itu, mereka menyediakan suatu forum bagi negosiasi diantara negara-negara.¹⁰

IPD sebagai institusi internasional memiliki elemen-elemen simbolis, aktivitas sosial, seperti penyelenggaraan forum, seminar, workshop, kerjasama *school of peace, democracy and development* serta adanya aturan-aturan dan norma walaupun tidak mengikat. Salah satu bentuk kegiatan IPD adalah dengan melakukan forum internasional di Myanmar yang membahas seputar pengalaman Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi serta diskusi tentang demokrasi.

IPD yang merupakan sebuah institusi internasional yang dibentuk untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi baik kepada negara-negara yang sudah menganut sistem demokrasi bahkan kepada negara-negara yang sedang menuju pada kehidupan yang lebih demokratis lagi. Sehingga dengan dibentuknya organisasi tersebut, dapat memberikan manfaat dan keuntungan untuk berbagai pihak baik kepada Indonesia sebagai salah satu negara yang membentuk organisasi tersebut maupun kepada negara yang bekerjasama dengan IPD seperti Myanmar.

2.2 Tinjauan Empirik

Dalam menjawab permasalahan tentang upaya Indonesia dalam mengembangkan demokrasi di Myanmar melalui kegiatan *Bali Democracy Forum* (BDF) dan *Institute for Peace and Democracy* (IPD), maka terdapat berbagai literatur yang penulis gunakan untuk mendukung kepentingan tulisan ini. Literatur yang penulis gunakan tersebut dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan perbandingan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan adanya berbagai literatur dapat dijadikan

¹⁰ Ibid. Hal: 195.

sebagai sebuah pijakan dan fondasi untuk membangun sebuah kesimpulan penelitian.

Terdapat berbagai literatur yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Diantaranya terdapat literatur yang ditulis oleh Simela Victor Muhamad dengan judul *Harapan Atas Peran ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dalam Mendorong Berkembangnya Demokratisasi di Myanmar*. Selain itu, penulis juga meninjau tulisan dari Widiyanata yang berjudul *Peran Indonesia dalam Mewujudkan Demokratisasi di ASEAN 1998-2010*. Kemudian tinjauan berikutnya adalah skripsi dari I Made Anom Wiranata yang berjudul *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Mempromosikan Demokrasi di ASEAN*. Referensi selanjutnya untuk mendukung penelitian ini adalah skripsi dari Adya Satya Puspita yang berjudul *Keikutsertaan Myanmar dalam Bali Democracy Forum (BDF)*. Jurnal yang selanjutnya digunakan oleh penulis untuk dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah tulisan dari Sita Hidriyah yang berjudul *Proses Demokratisasi Myanmar Menuju Pemilu Presiden Tahun 2012*.

Literatur yang pertama, dari Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Volume 15 No.2 Juni 2010 yang ditulis oleh Simela Victor Muhamad yang berjudul *Harapan Atas Peran ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dalam Mendorong Berkembangnya Demokratisasi di Myanmar*. Rezim militer Myanmar telah menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional termasuk ASEAN. Sebagai sebuah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang diwakili oleh pemerintah, sejauh ini telah berupaya mendorong Myanmar untuk mengembangkan demokrasi.

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), sebagai sebuah lembaga antar-parlemen negara-negara anggota ASEAN, yang juga kerap menyuarakan aspirasi rakyat negara-negara Asia Tenggara, seharusnya juga menaruh perhatian besar terhadap situasi yang terjadi di Myanmar tersebut.

Demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM telah menjadi perhatian AIPA, seperti terlihat dalam resolusi AIPA Nomor 29GA/2008/Pol/02, yakni '*Resolution on Strengthening Democracy, Promotion and Protection of Human Rights*', yang dikeluarkan pada Sidang umum ke-29 AIPA di Singapura pada Agustus 2008.¹¹

Memerhatikan perkembangan politik yang terjadi di Myanmar, AIPA sebagai lembaga antar-parlemen negara-negara ASEAN perlu mengambil peran dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar. AIPA adalah salah satu bentuk diplomasi parlemen. Dalam diplomasi parlemen itu sendiri, hal itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, pertama, secara *one to one* (dilakukan secara langsung diantara parlemen, atau anggota parlemen, dua negara). salah satu bentuk upaya adalah DPR RI atau anggota DPR RI menjalin dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan parlemen atau anggota parlemen negara sahabat. Mereka bersepakat untuk mendesak pemerintah dari negara-negara di suatu kawasan untuk lebih serius lagi dalam turut mengatasi suatu persolan regional atau internasional yang dianggap dapat mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan di kawasan itu. Cara kedua adalah dalam konteks hubungan kerja sama multilateral melalui organisasi atau asosiasi parlemen baik regional maupun internasional, diplomasi parlemen dapat dilakukan melalui sejumlah organisasi atau asosiasi antar parlemen yang telah ada seperti untuk tingkat global, kita mengenal Inter-Parliamentary Union (IPU).¹²

Sejauh ini AIPA, sebagai sebuah lembaga antar-parlemen di kawasan Asia Tenggara, tampaknya belum terlalu berperan dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar. Setidaknya kita belum pernah

¹¹ Simela Victor Muhamad. 2010. *Harapan Atas Peran ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dalam Mendorong Berkembangnya Demokratisasi di Myanmar*. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Volume 15, No.2. Hal: 373.

¹² Ibid. Hal: 389.

mendengar adanya pernyataan dari AIPA, sebagai sebuah institusi antar-parlemen, yang secara khusus mengeluarkan pernyataan politik terkait dengan isu demokratisasi di Myanmar. Padahal, AIPA dapat memainkan peran penting dalam mendorong berkembangnya demokratisasi di Myanmar melalui diplomasi parlemen.

Jurnal yang ditulis Simela Victor Muhamad menjadi literatur yang mendukung penelitian penulis, karena terdapat persamaan dalam upaya yang dilakukan untuk mendukung dan mendorong demokratisasi di Myanmar. Namun terdapat perbedaan diantara dua penelitian ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari aktor yang menjalankan upaya dalam mendorong demokratisasi di Myanmar. Penelitian sebelumnya melihat peran dari AIPA, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk melihat upaya dari *Institute for Peace and Democracy* (IPD) dalam mendorong demokratisasi dan perkembangan demokrasi di Myanmar.

Referensi yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam skripsi ini selanjutnya adalah sebuah jurnal yang berjudul *Peran Indonesia dalam Mewujudkan Demokratisasi di ASEAN 1998-2010* yang ditulis oleh Danar Widiyanta dalam Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Negeri Yogyakarta Volume VIII Nomor 1, Januari 2016. ASEAN yang merupakan organisasi regional di Asia Tenggara terdiri atas beberapa negara yang tentunya memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik-konflik antarnegara tersebut. Maka untuk mencapai keamanan ASEAN harus komunitas yang demokratis, toleran, partisipatoris dan transparan di Asia Tenggara.

Minat Indonesia dalam promosi demokrasi dan hak asasi manusia tidak hanya mencerminkan kemajuan demokratisasi di Indonesia, tetapi juga upaya untuk menegaskan kembali kepemimpinan tradisional di ASEAN. Agenda

demokratisasi ASEAN adalah inisiatif Indonesia. Indonesia ingin memainkan peran kembali dalam kancah regional ASEAN. Pada acara *ASEAN Senior Officials Meeting* (ASEAN SOM) bulan Juni 2003, Indonesia sudah berani menyerukan pada negara-negara anggota ASEAN untuk mendorong partisipasi masyarakat, khususnya melalui pelaksanaan pemilihan umum, memperkuat institusi peradilan dan reformasi hukum, hingga mendorong perlindungan hak asasi manusia melalui pendirian Komisi HAM ASEAN.¹³

Sebagai ketua Komite Tetap ASEAN, Indonesia ditugaskan menyusun rencana aksi untuk ASC (*ASEAN Security Community*). Kesempatan ini memungkinkan Indonesia dapat mengambil inisiatif untuk memasukkan agenda demokrasi dan hak asasi manusia sebagai bagian utama dari proyek pembangunan masyarakat ASEAN. *A draft of the ASEAN Security Community Plan of Action* (ASC POA), yang disajikan oleh Indonesia pada bulan Februari 2004, secara eksplisit memposisikan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai "nilai-nilai dan prinsip-prinsip sosio-politik umum" bahwa anggota ASEAN harus memelihara, dan untuk mencapai tujuan ini.¹⁴

Sesuai dengan amanat Piagam ASEAN, di KTT ASEAN ke-15 pada bulan Oktober 2009, anggota ASEAN meluncurkan Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) sebagai badan HAM ASEAN. Selanjutnya, Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak (ACWC) didirikan pada tanggal 11 April 2010. Selain itu, berkaitan dengan penanganan masalah politik di Burma pada tahun 2010, telah didirikan ALTSEAN (*Alternative ASEAN Network on Burma*) adalah jaringan

¹³ Danar Widiyanta. 2016. Peran Indonesia dalam Mewujudkan Demokratisasi di ASEAN. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, (Online), Vol. VIII, No. 1, Hal: 38.

¹⁴ Ibid. Hal: 40.

organisasi dan individu yang berbasis di negara-negara anggota ASEAN bekerja untuk mendukung gerakan hak asasi manusia dan demokrasi di Burma.¹⁵

Dalam mewujudkan demokratisasi di ASEAN tidaklah mudah mengingat beberapa negara yang menjadi anggota ASEAN hanya Indonesia dan Filipina yang menerapkan prinsip demokrasi secara serius di negaranya. Sementara negara-negara seperti Brunai, Laos, Myanmar dan Vietnam masih keberatan tentang penyebutan demokrasi sebagai sebuah tujuan utama ASEAN. Sehingga, rancangan dari ASC harus mengalami penyesuaian di tiap-tiap negara dan membutuhkan jangka waktu yang lama.

Jurnal ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Sebab dalam pembahasannya sama-sama akan membahas mengenai peran Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis di sebuah negara. Dalam jurnal tersebut membahas secara keseluruhan mengenai negara-negara ASEAN. Namun penulis ingin lebih spesifik membahas peran Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis di Myanmar. Selain itu, dalam jurnal yang dijadikan referensi tersebut juga menyebutkan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dan cara penyelesaian yang dilakukan oleh Indonesia dalam mewujudkan demokratisasi di ASEAN. Dari hasil tersebut bisa dijadikan bahan referensi juga untuk mengukur seberapa besar pengaruh Indonesia di Myanmar dengan melihat konflik-konflik yang terjadi di Myanmar.

Selanjutnya, terdapat jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana yang berjudul Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Volume V Nomor 1 tahun 2014, yang didalamnya berisi sebuah tulisan ilmiah dari I Made Anom Wiranata yang berjudul *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Mempromosikan Demokrasi di ASEAN*. Indonesia adalah

¹⁵ Ibid. Hal: 42.

negara yang menggagas promosi demokrasi dalam ASEAN dan sejauh ini telah berhasil melakukan konsultasi dengan negara-negara ASEAN lainnya yang sebagian besar terdiri dari negara yang non-demokrasi ataupun quasi-demokrasi, untuk menerima promosi demokrasi sebagai pilar Masyarakat ASEAN.

Saat Indonesia memasuki demokrasi, peran Kementerian Luar Negeri dalam merumuskan politik luar negeri semakin signifikan. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, inisiatif pembuatan kebijakan luar negeri berada pada Kemenlu dan presiden hanya berperan dalam memberikan persetujuan. Promosi demokrasi Indonesia di ASEAN tidak terlepas dari visi dan keyakinan Menlu Hassan Wirayuda tentang demokrasi sebagai masa depan perdamaian dunia. melalui sidang Majelis Umum PBB tahun 2001, beliau mengatakan bahwa persoalan global umat manusia seperti perang, terorisme, penjajahan, kekerasan massal, dan sebagainya adalah akibat hubungan manusia yang tidak seimbang. Solusinya adalah pengakuan pada prinsip kesetaraan hak-hak dasar manusia di hadapan hukum Tuhan dan hukum manusia. Melalui Menlu Hassan Wirajuda, Indonesia menyampaikan pesan bahwa demokrasi menjadi instrumen untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan.¹⁶

Upaya promosi demokrasi adalah bagian dari upaya untuk mendapatkan atau meningkatkan *power* dari suatu negara. Upaya Indonesia untuk mempromosikan demokrasi melalui kebijakan luar negerinya adalah bagian dari diplomasi publik untuk mengubah citra Indonesia dalam hal isu HAM. Promosi demokrasi Indonesia dalam kancah regional didorong sebagian oleh kebutuhan penting untuk memperbaiki citra internasional setelah insiden pasca jajak pendapat di Timor Timur pada tahun 1999, Bom Bali pada Oktober 2002

¹⁶ I Made Anom Wiranata. 2014. Politik Luar Negeri Indonesia dalam Mempromosikan Demokrasi di ASEAN. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, (Online), Vol. V, No. 1, Hal: 74.

yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah (JI), kelompok teroris Asia Tenggara yang memiliki jaringan dengan Al Qaeda, dan kekerasan komunal yang meletus pada masa-masa awal pemerintahan pasca-Suharto.¹⁷

Promosi demokrasi dalam pandangan realis adalah instrumen untuk mendapatkan atau meningkatkan *soft power* dari suatu negara. Upaya Indonesia untuk mempromosikan demokrasi melalui kebijakan luar negerinya adalah bagian dari diplomasi publik untuk mengubah citra Indonesia dalam hal isu HAM yang memiliki citra buruk pasca insiden kerusuhan saat jajak pendapat di Timor Timur dan kerusuhan etnis pada masa awal reformasi. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia berinisiatif untuk mempromosikan demokrasi di negara-negara ASEAN seperti di Myanmar.

Politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN bisa dijadikan sebagai acuan bagi penulis untuk melihat dan mengetahui bagaimana upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi di Myanmar. Dari jurnal tersebut kita dapat melihat bagaimana pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan luar negerinya mengoptimalkan peran dari Kementerian Luar Negeri untuk melakukan diplomasi dengan negara-negara lain seperti Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Myanmar.

Referensi yang penulis gunakan untuk mendukung penelitian ini adalah Skripsi dari Adya Satya Puspita dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2013 yang berjudul *Keikutsertaan Myanmar dalam Bali Democracy Forum (BDF)*. Secara umum tulisan tersebut membahas mengenai kepentingan Myanmar dalam mengikuti kegiatan BDF yang diselenggarakan oleh Indonesia serta manfaat apa yang diperoleh selama mengikuti kegiatan tersebut.

¹⁷ Ibid. Hal: 82.

Selain itu juga membahas tentang gambaran umum mengenai dinamika sistem politik dan pemerintahan di Myanmar.

Pemerintahan junta militer memunculkan berbagai pelanggaran HAM untuk rakyatnya. Rakyat Myanmar tidak mendapatkan rasa aman dan nyaman dari pemerintah yang berkuasa. Kekuasaan junta militer yang mencengkeram Myanmar selama kurang lebih 20 tahun tersebut mendapatkan tentangan dan protes dari berbagai pihak, baik dari dalam dan luar negeri.¹⁸

Dengan adanya tekanan dari berbagai pihak serta kuatnya pengaruh globalisasi membuat semakin derasnya pengaruh demokratisasi di setiap negara. maka untuk itulah salah satu hal yang membuat pada tahun 2011 Myanmar yang dulunya di kendalikan oleh Junta Militer melaksanakan pemilu yang telah menandakan bahwa Myanmar mulai menerapkan sistem demokrasi di negaranya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran dari Indonesia sebagai negara yang memiliki *power* di ASEAN serta sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia dalam melakukan berbagai upaya untuk membantu Myanmar dalam menyelesaikan konflik yang terjadi disana.

Salah satu upaya Indonesia adalah melaksanakan kegiatan *Bali Democracy Forum* (BDF). Sasaran BDF adalah untuk menjalin kerja sama yang mempromosikan pembangunan politik melalui dialog dan berbagi pengalaman untuk menginisiasi proses belajar dan berbagi antar negara sebagai suatu strategi menjaga perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di kawasan maupun di luar kawasan untuk membangun institusi yang berfungsi sebagai sumber informasi untuk penelitian dan pusat pembelajaran, serta wadah para ahli dalam berbagai hal yang berhubungan dengan pengembangan demokrasi.¹⁹

¹⁸ Adya Satya Puspiata. 2013. *Keikutsertaan Myanmar dalam Kegiatan Bali democracy forum (BDF)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal: 81. (online)

¹⁹ Ibid. Hal: 82.

Keikutsertaan Myanmar dalam kegiatan *Bali Democracy Forum* (BDF) tidak terlepas dari tekanan dari berbagai pihak mulai dari gerakan protes dari dalam negara Myanmar maupun dari luar negeri seperti Amerika Serikat, PBB hingga ASEAN. Kondisi politik serta konflik yang terjadi di Myanmar membuat banyak negara lain yang ikut prihatin atas kondisi tersebut. Myanmar selalu berupaya untuk meningkatkan nilai-nilai demokratis di negaranya seperti dengan melaksanakan pemilu namun selalu saja terjadi penolakan oleh pihak lawan yang kalah dalam hasil pemilu. Akibat hal tersebut harus membuat sebuah pilihan dan pilihan tersebut adalah memberikan peluang tumbuhnya demokrasi di negara tersebut pada tahun 2010.

Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN kerap kali mengadakan diplomasi dengan Myanmar dalam menangani konflik dan pengembangan demokrasi di Myanmar. Salah satunya adalah melalui kegiatan BDF serta peran dari *Institute for Peace and Democracy*. Myanmar turut berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi pertama tersebut. Dalam acara inilah pemerintahan junta militer mendapatkan lebih banyak informasi mengenai demokrasi. Pada *Bali Democracy Forum II* tahun 2009, Myanmar mengirimkan seorang pejabat setingkat menteri. Selain itu, Myanmar juga berpartisipasi dalam *Bali Democracy Forum III*, pada tahun 2010.²⁰

Dari skripsi ini dapat memberikan sebuah informasi mengenai keikutsertaan Myanmar dalam kegiatan BDF. Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan literatur yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini. sebab, dalam skripsi yang disusun ini juga menjelaskan mengenai upaya Indonesia dalam mempromosikan demokrasi di Myanmar melalui kegiatan BDF dan kerjasama dengan IPD.

²⁰ Ibid. Hal: 84.

Terdapat jurnal yang dijadikan referensi untuk penulis untuk mendukung penulisan skripsi ini. Jurnal tersebut berjudul *Proses Demokratisasi Myanmar Menuju Pemilu Presiden Tahun 2012* yang ditulis oleh Sita Hidriyah. Dalam tulisan tersebut secara umum membahas mengenai perubahan yang bisa menjadi langkah awal bagi Myanmar untuk dapat terus melakukan perubahan menuju negara yang lebih demokratis lagi.

Penerapan sistem demokrasi di Myanmar sejak awal sudah menimbulkan keraguan salah satu penyebabnya adalah kuatnya pengaruh militer di negara tersebut. Namun, terdapat tiga hal positif yang telah dihasilkan demokrasi Myanmar di dalam negeri yaitu terjadinya perubahan iklim politik, catatan hak asasi manusia yang di masa junta militer begitu buruk, kini telah menjadi lebih baik, Ketiga, para buruh yang di masa junta militer tidak memiliki kebebasan untuk menuntut kesejahteraan, saat ini justru diberikan kebebasan untuk mendirikan serikat pekerja dan kebebasan untuk melakukan unjuk rasa.²¹ Selain itu, proses menuju demokrasi tidak hanya ingin dicapai melalui pemilu, namun juga pada kebebasan pers.

Sedangkan, hubungan luar negeri yang harmonis antara Myanmar dan AS ini juga makin terlihat jelas ketika Clinton mengatakan akan menempatkan kembali duta besarnya di Myanmar. Clinton pun menjanjikan akan memberikan bantuan uang sejumlah 1,2 juta dollar AS untuk mendanai usaha kecil, pelayanan kesehatan, dan dana bagi korban ranjau darat. Selain itu, AS juga berencana akan memberikan bantuan program studi bahasa Inggris terhadap Myanmar.²²

Dari jurnal ini, kita dapat mengetahui dimana pada tahun 2012 Myanmar telah melakukan berbagai perubahan salah satunya melaksanakan

²¹ Sita Hidriyah. 2011. *Proses Demokratisasi Myanmar Menuju Pemilu Presiden Tahun 2012*. *Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol.III, No. 24. Hal: 6.

²² Ibid. Hal: 7.

pemilu untuk memberikan kebebasan kepada rakyat sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai demokratis di negaranya lagi. Proses Myanmar dalam menerapkan demokrasi perlu dilakukan pengawalan oleh negara-negara ASEAN dan dunia internasional untuk memastikan proses reformasi di Myanmar berjalan sesuai koridornya. Jurnal ini dapat mendukung skripsi penulis untuk memberikan informasi kepada penulis mengenai keinginan Myanmar untuk terus melakukan perubahan dalam menerapkan demokrasi di negaranya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²³ Dalam kerangka pemikiran berisi tentang bagaimana alur dari pemikiran yang dijadikan sebagai sebuah dasar-dasar pemikiran untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini serta memperkuat hasil yang akan ditimbulkan dalam penulisan skripsi ini. Pada kerangka pemikiran, penulis menjelaskan mulai latar belakang masalah, pokok-pokok penelitian dengan menggabungkan antara teori dan konsep dengan rumusan masalah yang ditulis dalam skripsi ini untuk menghasilkan sebuah kesimpulan sementara.

Pemilu pertama di Myanmar dilaksanakan pada tahun 1947. Pada tahun 1960 dilaksanakan pemilu yang kedua dan ditelah diangkat seorang Perdana Menteri dari hasil pemilihan yang demokratis. Selama 2 tahun masa kepemimpinan Perdana Menteri tersebut, pemerintah sipil dianggap telah gagal dalam menata kembali kondisi internal Myanmar sehingga pada tahun 1960 pihak militer melakukan kudeta. Pada saat itulah junta militer mulai menggantikan pemerintahan yang demokratis di Myanmar. Di Myanmar sering dilaksanakan

²³ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. Hal: 91.

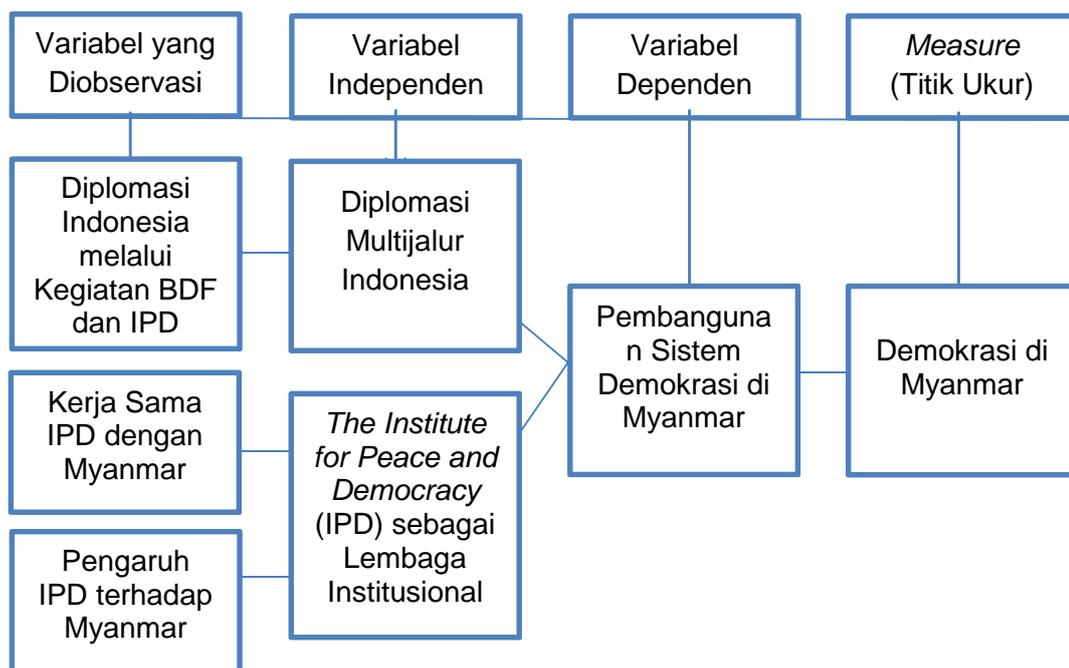
pergantian kepemimpinan namun, yang selalu menjadi pemimpin adalah dari pihak militer sehingga yang terjadi adalah terbentuknya pemerintahan yang diktator dan memerintah dengan gaya diktator. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh junta militer di Myanmar sangatlah kuat.

Myanmar adalah sebuah negara yang terdiri atas berbagai etnis seperti Indonesia dan etnis mayoritasnya adalah etnis Burma. Etnis Burma menjadi sebuah etnis mayoritas di Myanmar sehingga membuat etnis-etnis lain yang minoritas merasa ditindas dan memiliki hak kekuasaan yang tidak berimbang. Selain itu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh junta militer yang membuat nilai-nilai demokrasi mulai menghilang di Myanmar.

Myanmar adalah salah satu negara anggota ASEAN, maka konflik yang terjadi di Myanmar akan memberikan pengaruh kepada negara-negara anggota ASEAN lainnya sehingga sudah menjadi tanggungjawab ASEAN untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik di Myanmar secara damai. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang memiliki pengaruh yang cukup di ASEAN serta sebagai negara yang telah memiliki pengalaman berdemokrasi, maka disinilah terdapat upaya Indonesia untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Myanmar serta berupaya untuk terus menanamkan nilai-nilai demokrasi di Myanmar.

Dalam mempromosikan demokrasi di kancah internasional khususnya di Myanmar, maka Indonesia menyelenggarakan *Bali Democracy Forum* (BDF) sebagai upaya Indonesia mempromosikan serta membangun sistem demokrasi. Dalam forum ini dihadiri oleh negara-negara baik yang sudah menganut paham demokrasi maupun negara yang sedang dalam tahap pengembangan demokrasi seperti yang terjadi di Myanmar. Maka, *Bali Democracy Forum* (BDF) merupakan salah satu kontribusi Indonesia dalam pengembangan sistem demokrasi khususnya di Myanmar.

Sebagai tindak lanjut kegiatan BDF ini, Indonesia pada tahun 2008 meresmikan terbentuk *The Institute for Peace and Democracy* (IPD) sebagai sebuah institusi internasional yang menjalankan tugas-tugas untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi di berbagai negara seperti di Myanmar. IPD menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan bekerjasama dengan aparatur pemerintah di Myanmar seperti melaksanakan forum demokrasi, pelatihan kepada lembaga pemilihan umum di Mesir dan lain sebagainya. Maka untuk itulah penulis ingin mengetahui peranan diplomasi Indonesia melalui kegiatan BDF serta pengaruh dari IPD dalam membangun sistem demokrasi di Mesir. Secara lebih rinci kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan dalam bentuk bagan seperti berikut:



Bagan 2.1. Alur Kerangka Pemikiran

Variabel-Variabel yang diobservasi merupakan variabel atau objek yang dapat mempengaruhi variabel Independen (Bebas). Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti mengenai upaya diplomasi Indonesia dalam mengembangkan demokrasi di Myanmar melalui kegiatan *Bali Democracy Forum*

(BDF). Selain itu penulis ingin meneliti tentang IPD yang melakukan kerja sama dengan Myanmar serta pengaruh yang ditimbulkan terhadap pembangunan sistem demokrasi di Myanmar.

Selanjutnya, terdapat variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat).²⁴ Pada variabel ini, peneliti akan memperlihatkan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari upaya diplomasi multijalur Indonesia dengan menggunakan jalur kelima yaitu penelitian, pelatihan dan pendidikan serta dampaknya terhadap demokrasi di Mesir. Selain itu, peran dari IPD sebagai lembaga institusionalisme.

Kemudian, bergerak pada variabel penelitian selanjutnya yaitu terdapat dependen. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dengan adanya diplomasi Indonesia serta IPD sebagai lembaga institusi internasional maka menyebabkan perkembangan pembangunan sistem demokrasi di Myanmar.

Sedangkan, *measure* (alat ukur) yang berarti variabel yang menyebabkan terlaksananya penelitian ini. Latar belakang penelitian ini dilaksanakan adalah melihat kondisi politik di Myanmar. Dalam sistem politik dan pemerintahan di Myanmar, meskipun telah menerapkan nilai-nilai demokrasi seperti melaksanakan pemilu namun tidak dipungkiri pengaruh junta militer sangat kuat yang identik sering melakukan pelanggaran HAM dan inilah yang telah mencederai nilai-nilai demokrasi di Myanmar.

²⁴ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal: 39.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Skripsi ini menjelaskan tentang peranan diplomasi Indonesia dalam kegiatan *Bali Democracy Forum* (BDF) untuk membangun demokrasi di Myanmar. Selain itu, skripsi ini juga ingin membahas mengenai pengaruh *Institute for Peace and Democracy* (IPD) yang merupakan institusi yang dibangun dari hasil kegiatan *Bali Democracy Forum* (BDF) yang diselenggarakan oleh Indonesia dalam proses demokratisasi di Myanmar. Terlaksananya kegiatan *Bali Democracy Forum* (BDF) serta terbentuknya *Institute for Peace and Democracy* (IPD) merupakan wujud upaya Indonesia dalam membantu Myanmar untuk membangun demokrasi di negaranya. Maka untuk menjawab atau memecahkan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut John W. Cresswell, penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi atau memahami makna (*meaning*) yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan.¹ Pendekatan kualitatif merupakan jenis pendekatan yang menghasilkan penelitian yang bersifat data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif digunakan karena data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau informasi. Metode analisis data kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi kemudian dikelompokkan atau disederhanakan.

¹ Umar Suryadi Bakry. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal: 14.

Setelah itu data yang telah disederhanakan tersebut disajikan dan dari situlah penulis dapat menarik sebuah kesimpulan dari penulisan ini.

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini sebab, dalam penelitian ini secara umum ingin membahas tentang upaya Indonesia dalam membangun serta mengembangkan demokrasi di Myanmar. Dengan menggunakan metode kualitatif ini, penulis dapat mengetahui dan memberikan pemahaman-pemahaman dari fenomena sosial yang terjadi seperti pengembangan demokrasi di Myanmar dari sudut pandang peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan. Hasil penelitian tersebut berupa data dan informasi naratif yang telah dianalisis secara logis.

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran seorang peneliti dalam sebuah penelitian sangatlah penting. Sebab, tanpa peneliti tak akan bisa menghasilkan sebuah penelitian dan untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran peneliti dilapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Dalam penulisan ini, peneliti berperan sebagai pengamat penuh untuk mencari jawaban atau memecahkan rumusan masalah diatas.

Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Penulis disini merupakan perencana, pengumpul dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya yang telah dilakukan. Peneliti melakukan pengamatan dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung atau yang menangani masalah tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan dari kehadiran seorang peneliti yaitu mengamati dan memahami fenomena-fenomena sosial yang sedang terjadi contohnya konflik yang sering terjadi di Myanmar.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Makassar. Dalam hal pengumpulan data serta informasi yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, dilaksanakan di Makassar yaitu di Universitas Fajar Jl. Racing Center lebih khususnya lagi di perpustakaan Unifa selain itu juga mencari berbagai referensi yang terkait dengan judul yang diangkat di perpustakaan Universitas Hasanuddin, Makassar. Tempat ini dijadikan sebagai lokasi penelitian mengingat bahwa banyak referensi-referensi yang berkaitan dan berhubungan dengan judul yang ditulis. Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Pada tahap ini, penulis melaksanakannya di Makassar. Lebih khususnya analisis data dilaksanakan di kampus Universitas Fajar serta di jalan Perintis Kemerdekaan.

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya itu. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Pada penulisan ini, jenis data yang akan dikumpulkan berupa data-data yang akan diinterpretasikan sehingga data yang telah diolah tersebut dapat lebih dimengerti. Ada 2 jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu data sekunder dan data primer.²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data

² Burhan, Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Sidoarjo: Airlangga University Press. Hal: 129

sekunder kemudian dikategorikan menjadi dua yaitu; internal data yaitu pada sumber data sekunder umpama kalau ada perusahaan, dapat berupa faktur, laporan penjualan, pengiriman, *operating statements, general and departmental budgets*, laporan hasil riset yang lalu dan sebagainya. Selain itu terdapat eksternal data, yaitu data yang diperoleh dari sumber luar. Umpamanya data sensus dan data register, serta data yang diperoleh dari badan atau lembaga yang aktivitasnya mengumpulkan data atau keterangan yang relevan dengan/dalam berbagai masalah.³

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Untuk kepentingan tulisan ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi-informasi serta mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Referensi-referensi tersebut bisa didapatkan di perpustakaan, toko buku maupun sumber-sumber dari situs internet yang resmi dan bersifat ilmiah. Data dan informasi yang didapatkan tersebut diharapkan dapat mendukung penulisan skripsi ini.

3.6 Analisis Data

Analisis data sangat perlu dilakukan agar berbagai data yang telah diperoleh dapat disederhanakan sehingga nantinya akan dapat lebih mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data dilakukan dengan mereduksi data. Kemudian setelah itu dengan menyajikan data.

³ Ibid, Hal: 128.

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Baru setelah itu, proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

Analisis kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan adalah juga memiliki sifat-sifat kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana morfologi dan struktur variabel penelitian serta tujuan penelitian yang semestinya dicapai. Dalam banyak penelitian kualitatif, kita mengenal ada dua bentuk data, bentuk data satu dengan yang lain kadangkala terjadi tumpang tindih. Walaupun demikian, dengan mengenal sifat-sifat dasar dari bentuk-bentuk data tersebut, akan mempermudah kita dalam menentukan sikap yang harus ditempuh, apabila kalau seorang peneliti justru berada di lapangan.⁴

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam menganalisis data. Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna dibandingkan dengan sekedar angka-angka. Langkah-langkahnya adalah reduksi data, penyajian data dengan bagan dan teks, kemudian penarikan kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari hasil kajian berbagai referensi dideskriptifkan secara menyeluruh. Data-data tersebut adalah

⁴ Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Sidoarjo: Airlangga University Press. Hal: 285.

sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

3.7 Pengecekan Validitas Temuan

Suatu tulisan ataupun penelitian dapat dikatakan ilmiah apabila hasil penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diuji keabsahan hasil temuannya. Agar diperoleh sebuah hasil penelitian yang absah serta dapat diuji kredibilitasnya, maka penulis perlu melakukan observasi secara mendalam serta memperbanyak sumber bacaan atau referensi. Dalam pengecekan hasil temuan ini dapat dilakukan dengan mengkonfirmasi atau meninjau ulang hasil temuan atau data yang telah dikumpulkan oleh penulis kepada sumber informasi yaitu tempat dimana peneliti mendapatkan dan mengumpulkan informasi selama proses penelitian berlangsung.

3.8 Tahap-tahap Penelitian

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, tahap-tahap penelitian sangat perlu untuk dirancang agar penelitian yang akan dilakukan dapat sistematis dan terstruktur. Adapun tahap pertama yang dilakukan oleh penulis adalah tahap perencanaan penelitian. Penulis merancang sebuah topik yang akan diangkat untuk menjadi sebuah judul penelitian. Dari judul yang telah didapatkan tentunya penulis sudah mengetahui masalah-masalah apa yang muncul, dan dari masalah itulah penulis akan mendapatkan dan merumuskan sebuah solusi atas permasalahan yang ditemui. Selain itu penulis juga perlu mengetahui apa yang melatarbelakangi penelitian tersebut.

Setelah itu, dengan mengetahui masalah yang dihadapi maka langkah selanjutnya adalah dengan merancang proses penelitian untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian, seperti metode-metode apa yang akan dilakukan selama

proses penelitian berlangsung. Setelah merancang itu semua, masuklah pada tahap penelitian yang sebenarnya. Rancangan metode penelitian yang telah dibuat dilaksanakan dan diterapkan untuk memperoleh hasil penelitian yang diinginkan. Setelah mendapatkan hasil penelitian yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, sampailah pada tahap penulisan hasil penelitian. Ini merupakan tahap akhir dalam penulisan ini. Dimana data-data serta informasi yang didapatkan oleh penulis disajikan dalam sebuah karya ilmiah yang bisa diuji keabsahannya.

sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri atas lima bab yang dapat memberikan gambaran umum skripsi ini sehingga para pembaca dengan mudah dapat memahami skripsi ini. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini terdiri atas gambaran umum serta latar belakang masalah yang akan diteliti oleh penulis. Selain itu juga terdiri atas fokus penelitian dan rumusan masalah, tujuan penelitian serta kegunaan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri atas tinjauan teori dan konsep yang membahas mengenai teori dan konsep yang digunakan oleh penulis untuk membahas judul penelitian yang diangkat. Selain itu, pada bab ini terdapat tinjauan empirik yang didalamnya berisi berbagai referensi yang dapat mendukung penelitian ini. Bagian akhir bab ini terdapat kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini, memuat uraian tentang metode, cara dan langkah-langkah penelitian yang didalamnya terdiri atas rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan validitas temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Pembahasan

Pembahasan memuat uraian tentang data dan temuan yang telah diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah diuraikan pada Bab III. Uraian ini terdiri atas paparan data atau jawaban dari pertanyaan penelitian. Sesuai dengan pertanyaan penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai peran diplomasi Indonesia melalui kegiatan BDF serta pengaruh IPD dalam proses demokratisasi di Myanmar.

Bab V

Penutup merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Pada bab ini memuat temuan pokok atau kesimpulan, keterbatasan penelitian dan juga saran-saran atau rekomendasi yang diajukan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Upaya Diplomasi Indonesia dalam Perkembangan Demokrasi Di Myanmar

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis 'demokrasi' terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu '*demos*' yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan '*cratein*' atau '*cratos*' yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa *demos-cratein* atau *demoscratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹

Pada masyarakat umum mengenal demokrasi sebagai pemerintahan rakyat yang berarti pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur kehidupan negaranya sendiri. Dalam hal ini, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengikutsertakan anggota masyarakat sebuah negara secara aktif dalam mengambil sebuah keputusan. Bagi negara yang menganut paham demokrasi beranggapan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan serta kewajiban yang sama.

Demokrasi sebagai nilai dibangun di atas tiga pilar. Pertama, kebebasan. Demokrasi harus didukung oleh kebebasan individu dalam mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya. Karena demokrasi menuntut kebebasan berpendapat, maka tidak ada sensor terhadap pendapat. Pilar

¹ M Taupan. 1989. *Demokrasi Pancasila*. (Jakarta: Sinar Grafika). Hal: 21.

kedua adalah yakni pluratisme. Kebebasan perlu diiringi dengan penghargaan atas keragaman dan penghormatan terhadap kemajemukan. Pilar ketiga adalah adanya simpul, pengikat atau toleransi.² Kebebasan dalam pilar demokrasi bukan berarti setiap individu memiliki kebebasan dan berbuat sewenang-wenang, tetapi yang dimaksud kebebasan disini adalah bebas dan bertanggung jawab. Selain itu, sesama warga negara harusnya saling menghargai berbagai keberagaman.

Demokrasi dianggap sebagai upaya dalam perwujudan perdamaian. Dalam buku 'Kajian Konflik dan Perdamaian' disebutkan bahwa kelompok idealis atau utopian memiliki pandangan bahwa perdamaian bisa dicapai jika negara-negara di dunia bisa diatur dengan menggunakan suatu sistem atau ideologi yang sama seperti demokrasi.³ Demokrasi yang juga identik dengan liberalisasi semakin memperkuat terciptanya sebuah perdamaian. Karena dalam penerapannya, jika liberalisasi dijalankan maka akan menimbulkan ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lain dan karena ketergantungan tersebutlah negara akan saling menjaga hubungannya sehingga potensi untuk terjadinya perang semakin kecil. Untuk itulah banyak negara yang menganut paham ini dan berupaya untuk menyebarkan paham demokrasi untuk semakin mengurangi potensi perang yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Saat ini, telah terdapat banyak negara yang menganut paham demokrasi ditambah lagi dengan fenomena *arab spring* yang semakin menunjukkan eksistensi demokrasi. Untuk mengubah sebuah negara yang dulunya dipimpin oleh satu atau sekelompok orang yang otoriter menjadi sebuah negara demokrasi yang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan

² Gadug Kurniawan. 2015. *Kebebasan sebagai Hakekat Demokrasi*. Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I. Hal: 100.

³ Anak Agung Banyu Perwita. 2014. *Kajian Konflik dan Perdamaian*. (Cikarang: Graha Ilmu). Hlm: 4.

bukanlah sebuah perkara yang mudah. Sebab untuk menerapkan demokrasi membutuhkan proses yang cukup lama untuk mengubah pola pikir sebuah negara. Untuk itulah negara yang saat ini sedang menganut paham demokrasi telah melalui tahap yang panjang apalagi bagi negara yang telah lama dipimpin oleh junta militer yang otoriter. Salah satu contoh negara yang sedang membangun kehidupan demokrasi setelah sekian lama dikuasai oleh junta militer adalah Myanmar.

Kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win pada tahun 1962, menempatkan Myanmar dalam pemerintahan junta militer yang sangat otoriter. Myanmar sejak saat itu juga menjadi negara yang sangat tertutup, terutama terhadap pihak asing. Junta militer bertindak sangat tegas dan tak segan menggunakan kekerasan terhadap berbagai pihak oposisi yang mengancam pemerintahannya. Kondisi Myanmar cenderung semakin memburuk, terlihat dengan semakin tingginya angka kemiskinan dan bertambahnya jumlah pengangguran.⁴

Setelah terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat di Myanmar, maka tepatnya pada tahun 1990 pemerintah Myanmar mengadakan pemilihan umum yang ditujukan untuk memilih anggota parlemen. Kemenangan secara mutlak didapatkan oleh *National League for Democracy* (NLD) yang merupakan pihak oposisi terbesar yang mana Aung San Suu Kyi sebagai pemimpinnya. Namun hasil tersebut dibatalkan oleh pemerintah karena diduga banyak melakukan tindak kecurangan.⁵

⁴ Yolanda Utami Nilasari. 2014. *Proses Perubahan Politik di Myanmar: Menuju Demokrasi Melalui Pemilu*. Majalah Pengembangan Ilmu Sosial-FORUM Universitas Diponegoro, Volume 41 Nomor 1. Hal: 29.

⁵ Ibid. Hal: 30.

Kemudian muncul lagi demonstrasi besar-besaran pada tahun 2007. Gerakan perlawanan dipimpin oleh para Biksu. Pemerintah kembali menggunakan kekerasan untuk menghentikan aksi ini. Tindakan kekerasan tidak hanya dialami oleh warga sipil namun juga oleh para pemuka agama Budha. Kemudian pada tanggal 7 November 2010, Myanmar untuk pertama kalinya sejak 20 tahun terakhir kembali melaksanakan pemilu untuk memilih anggota parlemen. Namun, pada saat itu terdapat ketentuan dalam Undang-undang pemilu yang disusun agar Aung San Suu Kyi dan partainya tidak dapat ikut berpartisipasi. Sehingga Presiden Thein Sein yang ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya untuk melanjutkan kepemimpinan di negara tersebut mulai melakukan berbagai macam perubahan dan mereformasi kebijakan dibidang ekonomi dan politik. Pemilihan umum selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 1 April 2012. Pada saat itu NLD bukan lagi satu-satunya partai oposisi yang ada.⁶

Pelaksanaan pemilu serta adanya aturan hukum yang telah mengatur negara Myanmar membuat negara ini mendapat perhatian dan dukungan dari dunia internasional. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu. Namun, konflik internal yang terjadi di Myanmar membuat demokrasi di Myanmar tercederai. Konflik tersebut terjadi antara etnis Budha dengan etnis muslim Rohingya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM di negara ini.

Setelah sekian lama menjadi negara yang tertutup, Myanmar mulai membuka diri pada masyarakat internasional. Keinginan negara ini untuk menjadi negara yang demokratis tidak terlepas dari tekanan dari dalam negeri serta adanya berbagai berbagai tekanan dari negara-negara lain. Saat ini, Myanmar mulai bangkit dan menata kehidupan negara yang demokratis meskipun dalam

⁶ Ibid. Hal: 31.

penerapannya masih menemukan tantangan-tantangan seperti konflik Rohingya yang saat ini masih menjadi perhatian internasional.

Berbeda halnya dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Indonesia lebih memiliki pengalaman dalam menerapkan kehidupan demokratis yang lebih baik. Model demokrasi di Indonesia terdapat berbagai macam problem di dalamnya; pasca awal kemerdekaan periode demokrasi Parlementer 1945-1959, demokrasi Terpimpin periode 1959-1965, demokrasi Pancasila periode 1965-1998, dan demokrasi periode 1998 (Reformasi) hingga sekarang.⁷ Pada periode demokrasi Parlementer dan demokrasi Terpimpin dijalankan oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya model demokrasi Pancasila, Presiden Indonesia pada saat itu adalah Presiden Soeharto. Sedangkan pada era Reformasi diisi oleh beberapa Presiden Indonesia yang terpilih yaitu Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dan sekarang ini Joko Widodo.

Indonesia semakin memperbaiki diri untuk terus mengembangkan nilai-nilai demokratis di negaranya pada era reformasi. Hal tersebut dapat dilihat dari kebebasan masyarakat untuk memilih pemimpin negaranya selama periode 5 tahun. Selain itu, meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai macam etnis, suku, bahasa dan agama yang berbeda-beda tetapi mampu untuk hidup harmonis dalam sebuah negara yang bernama Indonesia. Hal tersebutlah yang kemudian mampu meyakinkan Indonesia sendiri bahkan dunia Internasional bahwa Indonesia telah menuju pada kehidupan yang lebih demokratis lagi.

Pengalaman yang dimiliki oleh Indonesia dalam menerapkan sistem demokrasi telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Maka tidak heran

⁷ Eko Prasetyo. *Demokrasi dan Problem Kepemimpinan Politik di Indonesia*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24118/1/EKO%20PRASETYO.pdf>. Hal: 1-2. Diakses pada tanggal 30 Juli 2017.

jika Indonesia saat ini dikenal sebagai sebuah negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan India. Indonesia mendapatkan selamat dan pujian dari para pemimpin Barat karena berhasil menjalankan proses demokrasi. Indonesia menerima penghargaan demokrasi (*Democracy Award*). Penghargaan ini diberikan oleh Asosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC / *International Association of Political Consultant*) yang merupakan organisasi profesi yang memperjuangkan demokrasi. Indonesia dinilai berhasil dalam mengembangkan proses transisi demokrasi. Presiden IAPC Ben Goddard menyatakan, penghargaan itu diberikan karena Indonesia telah menunjukkan komitmennya pada demokrasi.⁸ Hal tersebutlah yang menjadi kekuatan baru bagi Indonesia sebab dengan rentan waktu yang singkat Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam mengembangkan demokrasi di negaranya setelah tumbangannya pemerintahan Soeharto yang pada saat itu bersifat otoriter.

Dewi Fortuna Anwar, seorang akademisi dan penasihat kebijakan luar negeri yang berpengaruh pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibie menyampaikan bahwa identitas Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia perlu dibangun sebagai citra utama dari negara Indonesia.⁹ Demokrasi Indonesia telah mendapatkan pengakuan internasional dan ini menjadi kekuatan Indonesia untuk semakin berkiprah dan semakin menunjukkan pengaruhnya di kancah internasional.

Power yang dimiliki oleh sebuah negara merupakan sebuah aset yang sangat penting, sebab dengan memiliki *power* sebuah negara bisa lebih mudah untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Seperti halnya Indonesia, untuk menunjukkan eksistensinya di kancah internasional Indonesia menggunakan demokrasi untuk melakukan diplomasi publik.

⁸ <https://www.iapc.org/>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2017.

⁹ I Made Anom Wiranata. 2014. Politik Luar Negeri Indonesia dalam Mempromosikan Demokrasi di ASEAN. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, (Online), Vol. V, No. 1, Hal: 83.

Diplomasi publik adalah usaha negara untuk menciptakan opini atau mengubah opini di level internasional dengan cara berinteraksi aktor negara maupun aktor non-negara baik lembaga ataupun individu. Untuk melaksanakan diplomasi publik tersebut, pemerintah dari suatu negara akan melakukan komunikasi dengan publik di luar negeri untuk memberikan pengertian tentang cita-cita, tujuan, budaya serta kebijakan pemerintahnya.¹⁰

Dengan keberhasilan demokrasi yang telah didapatkan oleh Indonesia, maka dengan mudah Indonesia dapat melakukan diplomasi publik. Hal tersebut dilakukan untuk mengubah opini masyarakat Internasional serta mengubah citra Indonesia yang dulunya pernah dikenal sebagai negara yang pernah melakukan pelanggaran HAM terhadap warga negaranya. Dengan begitu akan semakin membuat Indonesia lebih dikenal serta memiliki pengaruh di kancah internasional. Maka untuk mempromosikan demokrasi, upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan melaksanakan sebuah kegiatan dan forum internasional yang disebut *Bali Democracy Forum* (BDF) serta mendirikan sebuah institusi internasional yang bergerak dibidang pengembangan demokrasi yaitu *The Institute for Peace and Democracy* (IPD).

4.1.1 Menyelenggarakan Kegiatan Bali Democracy Forum (BDF)

Bali Democracy Forum (BDF) merupakan sebuah forum yang membicarakan mengenai demokrasi, yang pertama kali diadakan di kawasan Asia. Maka dari itu, inisiatif penyelenggaraan BDF merupakan sebuah inspirasi yang fenomenal dalam strategi dan misi diplomasi Indonesia, hal ini khususnya dalam mendorong pengembangan serta mempromosikan demokrasi di kawasan Asia. Disamping itu, forum ini juga merupakan momentum bersejarah dimana

¹⁰ Ibid. Hal: 82.

perwakilan negara-negara Asia berbicara tentang demokrasi yang sebelumnya masih menjadi isu yang cukup sensitif di kawasan Asia.¹¹

BDF menjadi agenda tahunan di kawasan dan merupakan forum *sharing of experiences and best practices* di bidang perdamaian dan demokrasi. BDF mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang bersifat *home-grown*, menjunjung pluralisme, dan inklusif.¹² Kegiatan ini menjadi sebuah forum bertukar dan berbagi pengalaman tentang demokrasi dengan negara-negara lain serta menjadi sebuah gagasan dan inisiatif dari Indonesia untuk mempromosikan demokrasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perdamaian dunia dengan berdasarkan pengalaman yang nyata dari Indonesia selama menerapkan menerapkan sistem demokrasi.

BDF merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan sejak tahun 2008, dibawah naungan Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri.¹³ Kegiatan ini menjadi salah satu program kerja dari Kementerian Luar Negeri Indonesia selaku instansi yang berhubungan langsung dan menangani masalah hubungan luar negeri Indonesia.

BDF terinspirasi oleh *Davos Economic Forum* yang dinilai berhasil dalam menyelenggarakan pertemuan tahunan yang membicarakan mengenai berbagai isu ekonomi. Forum ini merupakan forum tahunan tingkat menteri dan tokoh berpengaruh yang bertujuan untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama dalam bidang *capacity building* untuk negara-negara demokratis dan negara-negara yang *aspiring be more democratic*. Sasaran dari penyelenggaraan BDF

¹¹ Adya Satya Puspita. 2013. *Keikutsertaan Myanmar dalam Kegiatan Bali Democracy Forum (BDF)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal: 52. (Pdf)

¹² Direktorat Informasi dan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2013. *Diplomasi Indonesia 2013: Fakta dan Angka*. Hal: 29.

¹³ Adya Satya Puspita. Op.Cit. Hal: 51.

adalah untuk menjalin kerjasama regional yang mempromosikan pembangunan politik melalui dialog dan berbagi pengalaman untuk menginisiasi proses belajar dan berbagi antar negara di Asia sebagai suatu strategi menjaga perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan kawasan dan diluar kawasan untuk membangun institusi yang berfungsi sebagai sumber informasi untuk penelitian dan pusat pembelajaran serta wadah para ahli dalam berbagai hal yang berhubungan dengan isu demokrasi.¹⁴

Kegiatan ini adalah prakarsa dari Indonesia yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama regional dalam isu demokrasi dan pembangunan politik diantara negara-negara di kawasan Asia. Forum ini bersifat eksklusif antarnegara demokratis, tetapi lebih merupakan forum inklusif bagi negara-negara di kawasan untuk berbagi pengalaman dan pelatihan terbaik dalam memperkuat demokrasi.¹⁵ Ini merupakan kontribusi Indonesia ditingkat internasional untuk turut serta menciptakan struktur kawasan yang stabil dan demokratis dan inilah juga peran Indonesia sebagai inisiator dari kegiatan BDF.

Peserta yang hadir dalam kegiatan BDF ini adalah perwakilan dari negara-negara Asia baik negara yang telah menganut demokrasi maupun yang belum menerapkan sistem demokrasi. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh negara-negara dari luar Asia seperti dari Amerika dan Eropa selaku negara observer. Tak hanya itu, berbagai jenis organisasi internasional juga ikut bergabung dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Indonesia ini. Dengan begitu, semakin banyak negara yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini akan semakin menunjukkan eksistensi Indonesia serta dapat dengan mudah mempromosikan demokrasi tanpa harus menggunakan kekerasan dan paksaan.

¹⁴ Ibid. Hal: 53.

¹⁵ Ibid. Hal: 54-55.

Hingga saat ini, kegiatan BDF ini masih menjadi agenda tahunan Indonesia untuk terus mempromosikan demokrasi. Setiap tahunnya Indonesia mengangkat sebuah tema yang berbeda dalam kegiatan ini, hal itu sesuai dengan kebutuhan serta masalah internasional saat ini. Waktu pelaksanaan dan tema kegiatan BDF setiap tahun sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pelaksanaan Kegiatan BDF

No.	Waktu Pelaksanaan	Tema Kegiatan	Negara Peserta
1.	10-11 Desember 2008	<i>Building and Consolidating Democracy: A Strategic Agenda for Asia</i>	Afganistan, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cina, India, Irak, Jepang, Yordania, Kazakhtan, Korea, Kuwait, Laos, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, New Zealand, Pakistan, Filipina, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka, Suriah, Thailand, Timur Leste, dan Vietnam.
2.	10-11 Desember 2009	<i>Promoting Synergy between Democracy and Development in Asia: Prospect for Regional Cooperation</i>	Afganistan, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cina, India, Irak, Jepang, Yordania, Kazakhtan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Pakistan, Filipina, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka, Tajikistan,

			Thailand, Timur Leste, Uzbekistan, dan Vietnam.
3.	10-11 Desember 2010	<i>Democracy and the Promotion of Peace and Stability</i>	Afganistan, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cina, Fiji Islands, India, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Kazakhtan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zaeland, Oman, Pakistan, Palestina, Filipina, Qatar, Rusia, Singapura, Solomon, Sri Lanka, Suriah, Thailand, Timur Leste, Turki, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, dan Yaman.
4.	8-9 Desember 2011	<i>Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices</i>	Afganistan, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Fiji, Georgia, India, Indonesia, Iran, Iraq, Jepang, Jordan, Republic of Korea, Kuwait, Laos, Lebanon, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Selandia Baru, Palau, Palestina, Papua New Guinea, Filipina, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Solomon Islands, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Turki, United Arab

			Emirates, Uzbekistan, Vietnam, and Yaman.
5.	8-9 November 2012	<i>Advancing Democratic Principles at the Global Setting: How Democratic Global Governance Contributes to International Peace and Security, Economic Development, and Effective Enjoyment of Human Rights</i>	Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, China, Fiji, India, Iran, Iraq, Jepang, Kazakhstan, Korea, Laos, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Oman, Pakistan, Palestina, Papua New Guinea, Filipina, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, Turki, United Arab Emirates, Uzbekistan, Vietnam, and Yaman.
6.	7-8 November 2013	<i>Consolidating Democracy in Pluralistic Society</i>	Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Tiongkok, India, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Kazakhstan, Korea Selatan, Kuwait, Kirgizstan, Laos, Lebanon, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Palestina, Filipina, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, VietNam, Yaman, Australia, Fiji,

			Selandia Baru, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon.
7.	10-11 Oktober 2014	<i>Evolving Regional Democratic Architecture: the Dynamics of Political Development, Socio-Economic Progress and Public Participation in the Democratic Process</i>	Afganistan, Azerbaijan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cina, Fiji Islands, India, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Kazakhtan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zaeland, Oman, Pakistan, Palestina, Filipina, Qatar, Rusia, Singapura, Solomon, Sri Lanka, Suriah, Thailand, Timur Leste, Turki, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, dan Yaman.
8.	10-11 Desember 2015	<i>Democracy and Effective Public Governance</i>	Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Fiji, Georgia, India, Indonesia, Iran, Iraq, Jepang, Jordan, Republic of Korea, Kuwait, Laos, Lebanon, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Selandia Baru, Palau, Palestina, Papua New Guinea, Filipina, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Solomon Islands, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Turki, United Arab

			Emirates, Uzbekistan, Vietnam, and Yaman.
9.	8-9 Desember 2016	<i>Religion, Democracy and Pluralism</i>	Afghanistan, Malaysia, Timor Leste, Armenia, Maldives, Tonga, Australia, Marshall Islands, Turki, Azerbaijan, Micronesia, Turkmenistan, Bahrain, Tuvalu, Bangladesh, Myanmar, United Arab Emirates, Bhutan, Nauru, Uzbekistan, Brunei Darussalam, Nepal, Vanuatu, Kamboja, New Zealand, VietNam, China, Oman, Yemen, Fiji, Pakistan, Georgia, Palau, India, Palestina, Iran, Papua New Guinea, Iraq, Filipina, Jepang, Qatar, Yordania, Rusia, Kazakhstan, Samoa, Kiribati, Saudi Arabia, Korea, Singapura, Kuwait, Sri Lanka, Laos, Tajikistan, Lebanon, dan Thailand

Sumber: <http://www.ipd.or.id/bdf/bali-democracy-forum-i>

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, selalu mengusung sebuah tema yang berbeda setiap tahunnya. Dari tema kegiatan itulah, Indonesia serta negara-negara yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini akan saling berdiskusi, berdialog serta berbagi pengalaman sesuai dengan tema yang diangkat. Dari sinilah Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan BDF ini mempromosikan demokrasi sesuai dengan pengalamannya selama menerapkan demokrasi serta

berbagi pengalaman dengan negara lain. Forum ini tidak berupaya untuk mendikte ataupun memaksa negara yang belum menerapkan demokrasi untuk segera menerapkan demokrasi, tetapi forum ini memberikan sebuah pembelajaran maupun pandangan kepada negara lain tentang demokrasi. Hal tersebut karena, kegiatan ini merupakan *soft diplomacy* dan langkah strategis diplomasi Indonesia untuk mempromosikan demokrasi secara konstruktif tanpa harus menimbulkan kegaduhan. Disinilah Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan serta sebagai mediator yang menjadi pihak yang netral dalam membantu negara lain dalam proses perundingan tanpa memaksa pihak atau negara lain.

Dalam kegiatan BDF ini, Indonesia mengundang serta mempertemukan negara-negara Asia untuk bersama-sama membahas mengenai demokrasi dalam suatu forum internasional. Disinilah Indonesia berperan sebagai mediator selaku pihak yang mempertemukan berbagai perwakilan pemangku kepentingan untuk mendengarkan keprihatinan satu sama lain, untuk belajar tentang situasi lingkungan, dan untuk menegosiasikan kesepakatan konsesus mengenai rencana tindakan selanjutnya yang dapat mereka implementasikan. Melalui kegiatan ini Indonesia dapat membantu Myanmar dalam mengembangkan serta penguatan demokrasi.¹⁶

Promosi demokrasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam kegiatan BDF ini merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan konsensus dan menghindari konfrontasi dengan negara yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Inilah yang menjadi salah satu alasan tingkat partisipasi negara untuk ikut dalam forum BDF ini semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan tingkat

¹⁶ Frank Fischer. 2015. *Handbook Analisis Kebijakan Publik*. (Bandung: Nusa Media). Hal: 717.

partisipasi yang tinggi, Indonesia telah menunjukkan bahwa BDF ini telah diterima oleh banyak negara sebagai forum internasional.

Salah satu negara yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tahunan ini adalah Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang pernah dipimpin oleh junta militer yang diktator, namun saat ini Myanmar berupaya untuk terus mengembangkan dan menerapkan demokrasi. Indonesia dan Myanmar merupakan negara yang hampir memiliki pengalaman yang sama namun disini Indonesia dalam rentang waktu yang singkat dapat dikatakan berhasil dalam menerapkan demokrasi. Berbeda halnya dengan Myanmar yang hingga saat ini masih berupaya dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi khususnya dalam kasus pelanggaran HAM. Maka, melalui kegiatan BDF ini Indonesia dapat menjalankan diplomasi demokrasinya kepada negara-negara lain khususnya Myanmar dan disini kita dapat melihat peran diplomasi Indonesia. Dengan ikut sertanya Myanmar dalam kegiatan BDF ini dapat memberikan manfaat berupa pembelajaran dan berbagi pengalaman dengan Myanmar sehingga pengembangan demokrasi di Myanmar dapat tercapai.

Myanmar adalah salah satu negara yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan *Bali Democracy Forum*. Dari sinilah Myanmar dapat belajar demokrasi dari pengalaman-pengalaman negara lain terutama dari Indonesia. Sepanjang perkembangan demokrasi di Myanmar, Indonesia mengambil peranan dalam penanaman dan pemahaman nilai-nilai demokrasi di Myanmar. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan BDF ini.

Dalam BDF I tahun 2008, Myanmar mengambil komitmen untuk memperkuat dan mengembangkan proses elektoral, meningkatkan peranan partai politik, menjunjung tinggi peran hukum dan memperkuat integritas dan kapasitas yudisial, mengembangkan dan memelihara *check and balance*

diantara badan-badan penyelenggara pemerintahan.¹⁷ Hal-hal yang disepakati oleh Myanmar tersebut merupakan hasil dari dialog yang dilaksanakan pada kegiatan BDF tahun 2008.

Dalam BDF II tahun 2009, Myanmar turut menyepakati meskipun demokrasi dan perkembangan pembangunan adalah dua konsep yang berbeda namun terkait, proses keduanya dapat memperkuat antara satu dan lainnya. Forum sepakat bahwa untuk mengembangkan bidang-bidang prioritas untuk kerjasama dalam demokrasi sebagai agenda strategis dan untuk mempromosikan sinergi antara demokrasi dan perkembangan pembangunan di Asia dan dalam bentuk kerjasama regional lainnya. Forum menggaris bawahi adanya kebutuhan bagi usaha bersama untuk meningkatkan pembangunan kapasitas dibidang demokrasi dan peranan integral kaum wanita dalam demokrasi.¹⁸ Pada BDF II, Myanmar mengirimkan seorang pejabat setingkat menteri. Hal ini menunjukkan bahwa *confidence* orang lain terhadap Indonesia sudah semakin tumbuh.

Dalam BDF III tahun 2010, Myanmar sepakat menyatakan bahwa demokrasi dapat bertahan dan berkembang dinegara yang memiliki supremasi hukum, good governance, dan media massanya menikmati kebebasan dan komunitas sipilnya diperkuat dan memiliki akses terhadap informasi. Kebebasan dan media yang bertanggung jawab sebagai faktor penting dalam pencapaian demokrasi yang berkelanjutan dan akuntabilitas publik.¹⁹ Dari sini Myanmar dapat belajar dan tahu bahwa sebuah sistem demokrasi dapat berkembang disebuah negara yang memiliki kejelasan hukum, transparansi kebijakan serta kebebasan bagi masyarakatnya.

¹⁷ Wilson Rojeki Sidauruk. 2015. Institute for Peace and Democracy (IPD) dalam Demokratisasi di Myanmar. *JOM FISIP*, Volume 2, No. 1. Hal: 7.

¹⁸ Ibid. Hal: 8.

¹⁹ Ibid. Hal: 9.

Komitmen Myanmar dalam mengembangkan demokrasi di negaranya dapat dilihat dari partisipasi Myanmar untuk terus mengikuti kegiatan BDF yang diselenggarakan oleh Indonesia setiap tahunnya. Hassan Wirajuda selaku penggagas BDF menilai pemerintah baru di Myanmar sudah memiliki kemauan untuk menyelesaikan masalah di Myanmar terutama konflik Rohingya. Selain itu, langkah Indonesia dalam kegiatan BDF membuat pemerintah Myanmar lebih nyaman mendapatkan bantuan dari Indonesia dalam penyelesaian konflik Rohingya. Aung Htoo selaku duta besar Myanmar untuk Indonesia menyatakan bahwa BDF merupakan pendekatan Indonesia yang tidak hanya menimbulkan kegaduhan tetapi turut aktif dalam mencari solusi. Aung juga menambahkan bahwa tema BDF 2016 yaitu agama, demokrasi dan keberagaman sangat relevan dengan situasi global saat ini termasuk di Myanmar. Tema tersebut dianggap sangat sesuai terutama tentang agama karena dalam demokrasi tidak bisa menghilangkan satu agama, tetapi harus menerima keberagaman sebagai hal mendasar dari demokrasi. Hal tersebut sebab demokrasi untuk semua orang, tidak hanya untuk satu agama.²⁰

Dalam keikutsertaan Myanmar dalam kegiatan BDF ini juga tidak terlepas dari pendekatan pribadi yang dilakukan oleh Presiden RI kepada Jenderal Than Swei melalui surat, disampaikan bahwa Indonesia menawarkan untuk berbagi pengalaman karena Indonesia dan Myanmar pernah mengalami situasi yang sama.²¹ Ini merupakan salah satu bentuk pendekatan dan penawaran Indonesia terhadap Myanmar untuk berbagi pengalaman demokrasi yang bisa menjadi acuan bagi Myanmar dalam memperkuat demokrasi di negaranya.

²⁰ <http://www.news.org/indonesian/berita/wirajuda-myanmar-12082016161145.html>. Diakses pada tanggal 27 September 2017.

²¹ Adya Satya Puspita. Op.Cit. Hal: 67.

Penguatan demokrasi di Myanmar dilakukan oleh Indonesia melalui *capacity building* berupa kegiatan dialog yang dilakukan seperti mengikuti kegiatan BDF. Indonesia dalam membantu pengembangan demokrasi Myanmar dan menekankan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi warga Rohingya, dilakukan melalui pembangunan inklusif dan berkesinambungan. Melalui kegiatan BDF ini, Indonesia menyediakan sumber dan aspirasi bagi negara Myanmar yang masih sangat muda dalam memulai alam demokrasi.

Dalam pengembangan dan penguatan demokrasi di Myanmar, Indonesia cukup memiliki peranan yang cukup penting. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia menggunakan *soft diplomacy*. Pengalaman Indonesia dalam bidang demokrasi, dijadikan sebagai kekuatan bagi Indonesia untuk melakukan diplomasi publik. Hal ini menjadi antitesa dari apa yang dilakukan oleh negara-negara barat yang seakan-akan memaksakan demokrasi untuk diadopsi di Myanmar yang justru menimbulkan instabilitas politik di Myanmar. Tetapi, Indonesia menggunakan diplomasi sebagai cara Indonesia untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi di Myanmar secara konstruktif dan mengakar tanpa harus menimbulkan kegaduhan.

Maka, salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia adalah melalui kegiatan BDF. Kegiatan BDF ini hanya semata-mata sebuah forum yang mempertemukan negara-negara di kawasan Asia baik negara yang telah menganut demokrasi maupun negara yang masih belajar untuk menerapkan demokrasi. BDF memprakarsai dan memfasilitasi untuk belajar dan berbagi pengalaman demokrasi sebagai strategi menuju konsolidasi perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di wilayah Asia dan sekitarnya. Pengenalan demokrasi Indonesia ini membuktikan bahwa demokrasi tidak hanya bisa

berkiblat ke Barat yang selama ini mendengungkan demokrasi tapi dalam sisi lain tindakannya banyak berkebalikan dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Indonesia dalam kegiatan BDF ini berperan sebagai inisiator kegiatan. Indonesia menginisiasi kegiatan ini menggunakan *soft power* karena dianggap efektif dan efisien sehingga mudah untuk dilakukan tanpa harus menggunakan kekerasan dan menelan biaya yang besar. Namun, terkadang menggunakan pendekatan *soft power* biasanya memakan waktu yang lama. Maka untuk itulah Indonesia sebagai inisiator kegiatan BDF menyelenggarakan kegiatan ini setiap tahunnya secara rutin dan berkesinambungan, agar apa yang menjadi tujuan kegiatan ini dapat tercapai terutama dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi di sebuah negara. Hal ini disebabkan demokrasi bukanlah suatu sistem yang bisa secara langsung dan secara utuh diterapkan di suatu negara, tetapi sebuah ideologi politik akan dihadapkan pada kondisi sosial, budaya, ekonomi dan geografi suatu negara. Maka untuk itulah suatu negara tidak dapat memaksakan ideologi atau paham politik di suatu negara. Seperti halnya dengan Indonesia yang tidak bisa memaksakan Myanmar untuk menganut paham demokrasi tetapi mengajak Myanmar dengan menggunakan pendekatan *soft diplomacy* untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai demokrasi kepada Myanmar melalui kegiatan *Bali Democracy Forum*.

BDF merupakan salah satu bentuk diplomasi dan promosi demokrasi yang dilakukan oleh Indonesia. Inisiatif penyelenggaraan BDF tidak terlepas dari pengalaman Indonesia serta prestasi Indonesia di kancah internasional yang dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Maka atas prestasi tersebut, sudah menjadi tanggung jawab dari Indonesia untuk berbagi pengalaman dengan negara lain untuk saling berbagi pengalaman dan belajar tentang demokrasi.

Indonesia dalam rangka menciptakan dan berpartisipasi aktif untuk menjaga perdamaian dunia sebagaimana salah satu tujuan nasional yang ingin dicapai Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berpartisipasi aktif dalam tata pergaulan internasional. Selain itu, dalam rangka menciptakan perdamaian dunia pemerintah Indonesia mengambil kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Aktif artinya dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan. Aktif memperjuangkan ketertiban dunia. Aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka salah satu langkah yang dilakukan oleh Indonesia adalah menyelenggarakan kegiatan *Bali Democracy Forum* (BDF).²² BDF menjadi salah satu kegiatan yang dapat mempertahankan dan meningkatkan perdamaian dunia dengan mengajak negara-negara lain untuk mengenal demokrasi yang mana demokrasi dianggap sebagai salah satu sistem yang dapat menciptakan perdamaian.

Association of South East Asian Nations (ASEAN) adalah salah satu organisasi internasional. Organisasi ini menekankan prinsip non intervensi atau prinsip tidak mencampuri urusan negara lain. Oleh karena itu, meskipun Myanmar dikuasai oleh junta militer yang represif ASEAN tetap mengusahakan cara-cara damai dalam menghadapi konflik internal Myanmar.²³ Indonesia

²² Rilia Tamara Lubyanti. *Peran Indonesia Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia*. https://www.academia.edu/22022483/PERAN_INDONESIA_DALAM_UPAYA_MENCiptakan_PERDAMAIAN_DUNIA. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2017 pukul 12.24 WITA.

²³ Bambang Cipto. 2006. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal: 70.

sebagai salah satu negara anggota ASEAN berupaya untuk terus menjaga keamanan kawasan negara ASEAN. Maka, untuk mewujudkan hal tersebut serta menangani masalah isu HAM yang terjadi di Myanmar terkait masalah Rohingya Indonesia menyelenggarakan kegiatan BDF melalui dialog secara damai tanpa mencampuri urusan dalam negeri Myanmar secara langsung. Melalui kegiatan inilah Indonesia memperkenalkan kepada Myanmar tentang demokrasi serta berdialog dan membahas bersama tentang konflik yang terjadi di Myanmar.

Dengan terlaksananya kegiatan BDF tentu terdapat manfaat yang didapatkan oleh Indonesia. Salah satunya adalah Indonesia dapat belajar dan lebih memperkuat demokrasi di negaranya sendiri. Hal tersebut terjadi sebab dalam kegiatan ini terdapat kegiatan saling berbagi informasi dan pengalaman tentang demokrasi.

Penyelenggaraan BDF juga tidak terlepas dari keinginan dan kepentingan Indonesia untuk menciptakan citra positif Indonesia di mata Internasional, yang mana Indonesia pernah dikenal sebagai negara yang buruk dalam masalah HAM pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Maka melalui kegiatan inilah Indonesia dapat mencapai tujuannya.

Mendapat opini yang positif dari pemerintahan negara asing menunjukkan bahwa promosi demokrasi oleh Indonesia telah berhasil memenuhi tujuan perubahan citra Indonesia. Kebijakan luar negeri yang dengan halus menekan Myanmar untuk mendemokratisasikan dirinya telah mendapat pujian dari pejabat tinggi pemerintah asing. Menteri Luar Negeri Australia Kevin Rudd menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia melalui ASEAN atas diplomasi yang halus terkait dengan Burma. Ini telah menjadi pekerjaan yang baik dari teman-teman di ASEAN, dan pekerjaan yang baik khususnya dari Menteri Luar Negeri Indonesia. Pujian serupa juga disampaikan Samantha Power, direktur organisasi multilateral dan hak asasi manusia di Dewan Keamanan Nasional AS,

yang mengatakan bahwa pengalaman domestik Indonesia dan pendekatan rendah hati, membuat orang-orang Myanmar melihat Indonesia sebagai tutor demokrasi lebih dapat diterima. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa ada kalanya negara-negara yang tidak demokratis lebih bisa dibujuk oleh Indonesia dibandingkan oleh Amerika Serikat.²⁴

BDF bukan hanya sekedar forum saja, tetapi melalui kegiatan ini dibentuklah sebuah institusi internasional sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Institusi tersebut adalah *Institute for Peace and Democracy* (IPD) yang mana Indonesia adalah negara yang menjadi inisiator institusi tersebut. Institusi inilah yang menjalankan kinerja dari BDF yang melakukan kerjasama dengan negara-negara lain seperti Myanmar untuk mempromosikan serta membantu penguatan demokrasi di Myanmar. Hal tersebut menunjukkan dalam kegiatan BDF ini, Indonesia berperan sebagai penghubung atau integrator kerjasama antara IPD dengan lembaga-lembaga yang ada di Myanmar.

4.1.2 Membentuk Institute for Peace and Democracy (IPD)

Institute for Peace and Democracy (IPD) dibentuk khusus untuk mengelola kegiatan BDF. Pembentukan IPD dilakukan pada pembukaan BDF I di Nusa Dua, Bali dan dilaksanakan secara langsung oleh Menlu Hassan Wirajuda. IPD ini merupakan *Implementing Agency* dari BDF. Penyelenggaraan BDF dan pembentukan IPD telah memberikan *Leverage* baru bagi bangsa Indonesia.²⁵

IPD dibentuk untuk menjamin keberlanjutan dalam menyelenggarakan kegiatan berkala BDF. Dalam menjalankan aktivitasnya, dibiayai dari pemerintah Indonesia serta dana hibah dari luar negeri dari negara-negara donor yang disebut '*Friends of IPD*' yaitu Australian AID, Embassy of Denmark, Kingdom of

²⁴ I Made Anom Wiranata. 2014. Politik Luar Negeri Indonesia dalam Mempromosikan Demokrasi di ASEAN. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, (Online), Vol. V, No. 1, Hal: 74. Ibid. Hal: 84.

²⁵ Adya Satya Puspita. Op.Cit. Hal: 59-60.

Netherlands, Norwegian Embassy, New Zealand Foreign Affairs and Trade, dan Japan Official Development Assistance.²⁶ Adapun keanggotaan dari IPD adalah:

Tabel 4.2 Keanggotaan IPD

Nama	Jabatan
Dr. N. Hassan Wirajuda	<i>Patron</i>
Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D	<i>Supervisory Board</i>
Letjen TNI (Purn.) Agus	<i>Chairman</i>
Dra. Artauli Tobing, M.A	<i>Treasurer</i>
I Ketut Putra Erawan	<i>Executive Director</i>
Slamet Pribadi	<i>Operations and Finance</i>
Ayu Wijaya	<i>External</i>
Hanika Triani	<i>Program Officer</i>
Kadek Ayu Puspita Dewi	<i>Finance Assistant</i>
Floretta	<i>Operation Officer</i>

Sumber: <http://www.ipd.or.id/ipd-team>

IPD bersifat independen dan *non profit* yang telah melakukan beberapa kegiatan. Lembaga yang membahas mengenai demokrasi dimaksud untuk pertama kalinya dilakukan pada tingkat pemerintah di kawasan Asia. Oleh karena itu, inisiatif penyelenggara dan pembentukan IPD merupakan inspirasi yang fenomenal dalam strategi dan misi diplomasi Indonesia khususnya dalam mendorong pengembangan dan mempromosikan demokrasi di kawasan Asia. Forum ini juga merupakan momentum sejarah dimana perwakilan negara-negara

²⁶ <http://www.ipd.or.id/friends-of-ipd>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2017 pukul 13.03 WITA.

Asia berbicara tentang demokrasi yang masih menjadi isu sensitif di kawasan Asia.²⁷

Berdasarkan tujuan dari didirikannya IPD yaitu mendukung tujuan dari kegiatan BDF khususnya dalam menciptakan perdamaian dan fungsi demokrasi dalam prakteknya, maka IPD memiliki kewenangan atau mandat yaitu sebagai berikut:

1. Pertukaran Intelektual: IPD mengundang pejabat pemerintah, pembuat kebijakan, akademisi, masyarakat sipil dan praktisi dari negara-negara peserta untuk terlibat satu sama lain melalui seminar, lokakarya dan konferensi.
2. Pelatihan untuk Praktisi: IPD menyelenggarakan program pelatihan di antaranya untuk pelaksana pemilu, anggota partai politik, anggota parlemen, profesional media dan perencana pembangunan.
3. Misi Bersama: IPD menyelenggarakan misi bersama yang melibatkan para ahli dan pejabat pemerintah dari negara-negara yang berpartisipasi dalam *Bali Democracy Forum* (BDF). Misi bersama memberikan dukungan bantuan teknis seperlunya dan atas permintaan pemerintah dari negara-negara peserta.
4. Membangun Jaringan: IPD berpartisipasi dalam berbagai jaringan seperti *think-tank*, universitas, organisasi internasional, lembaga penelitian, dan institusi lainnya yang terlibat dalam isu-isu yang relevan dengan BDF dan tujuan dari IPD.²⁸

IPD dilaksanakan berdasarkan keperluan untuk mengatur proses pembelajaran dialog yang komprehensif dalam demokrasi. Dalam hal ini, IPD

²⁷ Wilson Rojeki Sidauruk. 2015. Institute for Peace and Democracy (IPD) dalam Demokratisasi di Myanmar. *JOM FISIP*, Volume 2, No. 1. Hal: 3.

²⁸ Institute for Peace and Democracy. 2012. *Comprehensive Program Report*. Hal: 4. Diakses dari <http://www.ipd.or.id/comprehensive-program-report>. Pada tanggal 12 Agustus 2017 pukul 13.30 wita.

membuka forum dialog dalam agenda *Bali Democracy Forum* (BDF) yang menjadi agenda tahunan sejak tahun 2008. Dialog dapat meliputi pertukaran pengalaman dan praktek dalam demokrasi. Dialog ini juga bertujuan mempromosikan kerjasama antar negara dalam pengembangan kelembagaan sosial dan politik untuk pemerintahan yang demokratik. Oleh karena itu, forum akan mendiskusikan sejumlah isu berkaitan dengan pengembangan demokrasi.²⁹

Keberadaan institut ini sebagai tindak lanjut berbagai rekomendasi yang dihasilkan dalam kegiatan *Bali Democracy Forum* (BDF) serta menjamin keberlanjutan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berkala BDF. IPD inilah yang menjalankan kegiatan harian dan program kerja yang dihasilkan dalam forum BDF terutama dalam hal mempromosikan demokrasi. Melalui IPD ini juga Indonesia dapat berdiplomasi dan mempromosikan demokrasi kepada negara-negara lain seperti Myanmar.

Sekarang ini, kegiatan diplomasi tidak lagi terpusat dan menjadi prioritas dari pemerintah sebuah negara. Namun, terdapat beberapa aktor-aktor lain yang juga dapat menjalankan kegiatan diplomasi. Hal tersebut karena jangkauan hubungan internasional semakin luas, yang mana interaksi antar negara sudah mencakup di berbagai bidang sehingga kegiatan diplomasi tidak hanya terpaku pada pemerintah tetapi bisa juga dilakukan oleh para pelaku bisnis, media, serta kelompok pemikir (*think tank*).

Think tank adalah salah satu aktor hubungan internasional yang juga dapat melaksanakan kegiatan diplomasi pada sebuah negara untuk menciptakan perdamaian. Dalam proses diplomasi untuk mencapai sebuah tujuan biasanya dilakukan melalui *think tank*. Inilah yang menjadi salah satu penggunaan diplomasi multi jalur, bahwa saat ini bukan hanya pemerintah saja yang dapat berdiplomasi dengan negara negara tetapi terdapat aktor-aktor lain.

²⁹ Wilson Rojeki Sidauruk. Op.cit. Hal: 4.

Pada *multitrack diplomacy*, *think tank* adalah jalur kelima yang merupakan pencapaian perdamaian melalui penelitian, pelatihan, dan pendidikan, atau perdamaian melalui *learning*. Hal ini berarti bahwa dalam menciptakan sebuah perdamaian, salah satu yang dilakukan oleh sebuah negara adalah melakukan diplomasi melalui kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dan pembelajaran kepada negara yang lain agar mencapai suatu gagasan dan tujuan yang sama. Terciptanya sebuah tujuan dan kepentingan yang sama antar negara akan membuat kemungkinan besar konflik tidak akan terjadi.

Think tank secara umum diartikan sebagai lembaga independen atau lembaga mitra yang bersifat tetap dan didedikasikan untuk penelitian, analisis dan perencanaan kebijakan.³⁰ *Think tank* menjadi sebuah lembaga yang dibentuk untuk mengkaji berbagai isu-isu internasional. Dalam hal ini, *think tank* menjadi sebuah jembatan atau lembaga yang menghubungkan antara para akademisi dengan para pembuat kebijakan.

Think tank adalah lembaga institusi yang menghasilkan penelitian yang berorientasi pada kebijakan, analisis dan nasihat tentang isu-isu domestik dan internasional dalam upaya untuk memungkinkan para pembuat kebijakan dan masyarakat untuk membuat keputusan tentang isu-isu kebijakan publik. Aktor ini bertindak sebagai jembatan antara komunitas akademik dengan pengambil kebijakan, melayani kepentingan publik sebagai suara independen yang menerjemahkan terapan dan penelitian dasar ke dalam bahasa dan bentuk yang dapat dimengerti, dipercaya dan dapat diakses bagi para pembuat kebijakan dan masyarakat. *Think tank* dapat bergabung dengan pemerintah, partai politik,

³⁰ Jessica Mackenzie. 2015. *Mengembangkan Think Tank Pemerintah: Sebuah Ulasan Model Komparatif*. Kementerian PPN/BAPPENAS. Hal: 4.

pihak-pihak yang berkepentingan, perusahaan swasta atau organisasi independen non-pemerintah (LSM).³¹

Di Indonesia ada terdapat banyak *think tank* yang bergerak dibidangnya masing-masing. Salah satunya adalah *Institute for Peace and Democracy* (IPD). IPD ini merupakan institusi yang bergerak dibidang pengembangan dan promosi demokrasi. Sebagai sebuah institusi yang dibentuk dari hasil kegiatan BDF, IPD ini menjadi sebuah institusi yang menjalankan kegiatan BDF. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempromosikan demokrasi kepada negara-negara lain melalui diplomasi. Jadi, disinilah peran IPD sebagai lembaga *think tank* yang dapat menjalankan kegiatan diplomasi.

Dalam melakukan kegiatan diplomasi, IPD bertugas untuk mempromosikan demokrasi kepada negara-negara lain seperti Myanmar. Sebagai tindak lanjut Myanmar untuk mengembangkan dan memperkuat demokrasi, IPD sebagai lembaga *think tank* Indonesia berupaya untuk mempromosikan demokrasi melalui kegiatan-kegiatan seperti menyelenggarakan kegiatan seperti pelatihan dan *workshop*.

Tugas dari IPD pada pokoknya adalah mendorong pertukaran pandangan dan pengalaman melalui berbagai kegiatan seperti antara lain *workshop*, seminar, kuliah umum, election visit, pelatihan bagi aparatur negara, dan memperluas jejaring. Untuk jangka-panjang, IPD diharapkan menjadi center of excellence di kawasan maupun di tingkat global.³² Kegiatan-kegiatan seperti inilah yang dilaksanakan oleh IPD dengan negara-negara lain seperti Myanmar untuk mempromosikan serta memperkuat demokrasi.

³¹ <https://www.slideshare.net/DadangSolihin/2013-042-lemhannas>. *Membangun Lembaga Think Tanks*. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2017.

³² <https://www.scribd.com/document/102810816/Compile-BDF>. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2017 pukul 15.30 wita.

Dalam mendukung transisi demokrasi di Myanmar, Indonesia melalui IPD mengadakan dialog mengenai isu-isu terkait dengan pembangunan demokrasi dan perdamaian berkelanjutan di Myanmar. Dialog yang pertama diselenggarakan di Myanmar pada tanggal 26-28 Juni 2013, yang mengangkat sebuah tema yaitu *Indonesia-Myanmar Dialogue on Democratic Transition: Building Democracy and Sustainable Peace*. Selanjutnya, dialog yang kedua membahas tentang *Indonesia-Myanmar Dialogue on Decentralization, Democratization and Peace Building* pada tanggal 24-25 September 2013 di Myanmar. Dialog yang ketiga membahas mengenai *Indonesia-Myanmar on Leadership and Political Party Reform*, yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 7-9 November 2013. Pada tanggal 7-8 April 2014 dialog Indonesia-Myanmar kembali diselenggarakan dengan tema *Parliamentary Reform and Election Management* di Bali.³³

Dalam dialog serta seminar yang dilaksanakan, mengundang berbagai kalangan salah satunya dari partai politik. Dalam dialog tersebut, mengundang para politisi dari Indonesia maupun dari Myanmar untuk berbagi pengalaman. Partai Golkar, Dewa Rai Budiasa, dan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Anak Agung Putri Astrid dan Nyoman Sudiantara. Selain itu dari perwakilan Myanmar yaitu Dr. Daw Shwe Pon dari *National League for Democracy* (NLD) serta Daw Khin Tet Tun dari *Union Solidarity Development Party* (USDP).³⁴

IPD mengadakan kunjungan dan kerjasama dengan pemerintah Myanmar yang didelegasikan oleh Hassan Wirajuda. Hassan Wirajuda berkesempatan untuk memberikan ceramah umum di hadapan peserta School of

³³ Institute for Peace and Democracy. 2014. *Comprehensive Program Report*. Hal: 1. Diakses dari <http://www.ipd.or.id/comprehensive-program-report>. Pada tanggal 19 Agustus 2017 pukul 20.20 wita.

³⁴ Ibid. Hal: 5.

Peace, Democracy and Development. Selain itu, Hassan juga melakukan pertemuan dengan beberapa pihak lainnya antara lain Group of Friends of Democratic Parties, Chief Minister (Gubernur) wilayah Yangon dan Bago, Union Election Commission (KPU).³⁵ Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu Myanmar dalam pengembangan demokrasi di negaranya serta merupakan upaya promosi demokrasi Indonesia. Kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan tugas dari IPD dalam pertukaran intelektual.

IPD telah menjadi institusi utama bagi negara-negara di kawasan untuk berbagi pandangan konstruktif, ide dan pelajaran demokrasi tanpa penilaian atau pemaksaan. Ini menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mengambil bagian tanpa beban pretensi. Di Asia Tenggara, Myanmar mengadakan pemilihan umum dan mempercepat transisi politik sebagai bagian dari peta jalan menuju demokrasi. IPD menyatakan dukungan bagi Myanmar karena terus berupaya memajukan reformasi dan pembangunan demokrasi, terutama untuk mencapai rekonsiliasi dan perdamaian abadi.³⁶

Pada pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak terkait dimaksud telah dibahas mengenai kerjasama yang lebih konkrit dalam upaya membantu Myanmar menjalani transisi demokrasi, termasuk memajukan IPD untuk membantu capacity building institusi terkait di Myanmar. Salah satu peninjauan yang dilakukan adalah menjadikan School of Peace, Democracy and Development yang berada di bawah naungan Myanmar Development and Research Institute (MDRI) sebagai counterpart dari IPD.³⁷ Dalam hal ini, IPD sebagai sebuah institusi berupaya untuk membangun jaringan dengan lembaga institusi di Myanmar yang juga memiliki tujuan yang sama yaitu dalam pengembangan demokrasi di Myanmar.

³⁵ Wilson Rojeki Sidauruk. Op.Cit. Hal: 9-10.

³⁶ Ibid. Hal: 10.

³⁷ Ibid. Hal: 11.

Selain itu, *'Indonesia-Myanmar Dialogue on Leadership and Political Party Reform'* yang digagas oleh *Institute for Peace and Democracy* (IPD) dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon Myanmar. Salah satu bentuk kegiatannya adalah pemerintah Myanmar berkunjung ke KPU Provinsi Bali pada hari Jumat, 8 November 2013.³⁸ Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepercayaan Myanmar kepada Indonesia sebagai inspirasi untuk mengembangkan demokrasi di Myanmar serta sebagai upaya untuk berbagi pengalaman mengenai lembaga-lembaga pemilihan umum.

Sebanyak 59 orang yang terdiri dari perwakilan pemerintahan, partai politik, cendekiawan, media serta perwakilan dari mahasiswa tersebut disambut oleh Ketua, Anggota, Sekretaris dan Jajaran Pejabat Struktural dilingkungan KPU Provinsi Bali. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Bali, Dewa Raka Sandi memberikan beberapa penjelasan mengenai informasi sistem pemilihan yang ada di Indonesia serta memberikan gambaran singkat tentang pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali yang lalu.³⁹ Proses diskusi dan berbagi pengalaman ini juga memungkinkan terjadinya interaksi lebih jauh diantara para peserta yang berasal dari berbagai negara yang berbeda-beda, sehingga proses pengenalan dan penyamaan persepsi dapat berlangsung secara lebih mendalam.

Pada tanggal 18 September 2012, sebuah delegasi dari Myanmar yang dipimpin oleh Kepala Penasehat Politik Presiden Myanmar bertemu dengan IPD di Jakarta untuk membahas tindak lanjut program pemberdayaan Badan Pengawas Pemilu Myanmar dan sebuah program pelatihan untuk jurnalisisme / media perdamaian. Program berbagi pengalaman dan pelajaran mengenai pengalaman demokrasi kedua negara diyakini memberi dasar yang kuat untuk

³⁸ <http://bali.kpu.go.id/?pg=beritadetail&id=329>. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2017 pukul 20.15 wita.

³⁹ Ibid.

masa depan kolaborasi antara kedua negara.⁴⁰ Ini merupakan salah satu bentuk peran IPD dalam memberikan pelatihan kepada para praktisi seperti Bawaslu Myanmar untuk memberikan pelajaran dan berbagi pengalaman mengenai pemilu di Indonesia.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut adalah bentuk diplomasi untuk mempromosikan demokrasi di Myanmar melalui IPD. Hal ini telah menunjukkan bahwa kegiatan diplomasi tidak hanya terpaku oleh pemerintah saja, tetapi terdapat aktor lain seperti IPD sebagai salah satu *think tank* Indonesia untuk mempromosikan demokrasi di Myanmar. IPD sebagai sebuah Institusi selalu berupaya untuk mempromosikan demokrasi melalui berbagai kegiatan-kegiatan dan kerjasama yang diyakini dapat memberikan manfaat bagi kedua negara.

4.2 Pengaruh Institute For Peace And Democracy (IPD) Dalam Proses Demokratisasi Di Myanmar

Perkembangan transisi politik Myanmar telah menjadi isu internasional, terlebih ketika isu tersebut berkembang dengan menyentuh nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Myanmar merupakan negara yang sejak merdeka telah menganut ideologi demokrasi, namun sejak tahun 1952 rezim demokratis runtuh dan mulai diperintah secara otoriter dan gaya diktator. Hal tersebut, menimbulkan reaksi dari dalam maupun luar negeri yang menuntut agar Myanmar kembali menjadi negara yang demokrasi. Situasi politik semakin terkendali sejak tahun 2011 dimana nilai demokrasi semakin berkembang salah satunya dengan mulai diselenggarakannya kegiatan pemilu. Transisi politik menuju kehidupan

⁴⁰ Institute for Peace and Democracy. 2012. *Comprehensive Program Report*. Hal: 17. Diakses dari <http://www.ipd.or.id/comprehensive-program-report>. Pada tanggal 12 Agustus 2017 pukul 16.40 wita.

demokratis di Myanmar tidak terlepas dari dukungan dan dorongan dari berbagai pihak khususnya dari Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang telah memiliki pengalaman dalam penerapan demokrasi, mendukung serta membantu Myanmar dalam menerapkan demokrasi di negaranya. Dalam membantu Myanmar untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, Indonesia menggunakan cara-cara diplomatis tanpa menggunakan paksaan dan kekerasan yang justru dapat menimbulkan ketegangan politik di Myanmar.

Dalam proses transisi politik Myanmar, Indonesia mengambil peran untuk membantu mendorong demokrasi di Myanmar. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan menyelenggarakan kegiatan *Bali Democracy Forum* (BDF) serta membentuk sebuah lembaga institusi yaitu *Institute for Peace and Democracy* (IPD). Upaya-upaya yang dilakukan tersebut menggunakan *soft power* untuk mempromosikan demokrasi kepada negara-negara lain khususnya kepada Myanmar.

Bali Democracy Forum (BDF) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Indonesia di Nusa Dua, Bali. Kegiatan ini merupakan forum internasional yang mendatangkan negara-negara peserta dari Asia untuk memperkenalkan dan mempromosikan demokrasi kepada negara-negara Asia. Selain itu, melalui kegiatan ini negara-negara saling berbagi pengalaman dan pandangan mengenai demokrasi. Kegiatan BDF akan menghasilkan *Chairman Statement* yang merefleksikan diskusi dari para pemimpin dan wakil negara peserta, perdebatan umum, dan sesi interaktif. *Chairman statement* itu kemudian akan dijadikan pedoman untuk program kegiatan. Myanmar adalah salah satu negara yang setiap tahunnya selalu ikut berpartisipasi untuk menghadiri kegiatan BDF ini serta berkomitmen untuk terus mengembangkan demokrasi dinegaranya.

Institute for Peace and Democracy (IPD) adalah salah satu lembaga atau *think tank* yang dibentuk oleh Indonesia sebagai sebuah tindak lanjut dari kegiatan BDF. Dari kegiatan BDF, akan dihasilkan sebuah *chairman statement* yang kemudian akan dijadikan sebagai suatu program kegiatan yang akan dijalankan oleh IPD. Dalam mempromosikan serta membantu Myanmar melalui proses transisi politik, Indonesia melalui IPD bekerja sama dengan berbagai pihak di Myanmar seperti dengan lembaga pemilihan umum serta dengan lembaga-lembaga terkait.

Berdasarkan mandat yang diberikan, IPD sebagai tindak lanjut dari kegiatan BDF menyelenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan serta mendukung Myanmar dalam mengembangkan demokrasi di negaranya. Program kegiatan yang dilakukan seperti menyelenggarakan seminar yang bertajuk demokrasi, berbagi pengalaman dengan lembaga terkait dengan pemilu, melaksanakan pelatihan, serta membangun atau memperluas jaringan dengan lembaga-lembaga di Myanmar yang memiliki tujuan yang sama yaitu pengembangan demokrasi. Kegiatan-kegiatan seperti itulah yang menjadi peran dari Indonesia melalui IPD untuk mempromosikan demokrasi kepada Myanmar untuk membantu dalam pengembangan dan penguatan demokrasi di negaranya.

Konsep Institusionalisme menekankan bahwa institusi-institusi dibuat karena tidak adanya kepercayaan diantara negara-negara. Mereka melakukan hal itu dengan memberikan aliran informasi diantara negara-negara anggotanya, sehingga setiap negara mempunyai informasi sedikit banyak tentang apa yang dilakukan negara lain dan mengapa. Dengan demikian, institusi-institusi itu membantu mengurangi rasa takut negara anggota satu sama lain. selain itu,

mereka menyediakan suatu forum bagi negosiasi diantara negara-negara.⁴¹ Melihat konflik serta keinginan dari Myanmar dalam menerapkan demokrasi, maka dibutuhkan sebuah lembaga atau institusi yang dapat memberikan solusi atas masalah yang terjadi di Myanmar. Maka, IPD inilah yang menjadi sebuah institusi yang digagas oleh Indonesia untuk menyelesaikan masalah di Myanmar dengan melaksanakan beberapa program kegiatan untuk mendukung serta membantu Myanmar melewati transisi politik serta pengembangan demokrasi di Myanmar.

Terbentuknya IPD sebagai suatu institusi yang diprakarsai oleh Indonesia tentunya memiliki pengaruh terhadap negara-negara yang ikut berpartisipasi dan bekerjasama dengan IPD. Pengaruh yang didapatkan tersebut tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara Myanmar dengan IPD. Kerjasama Myanmar dengan IPD serta keikutsertaannya dalam mengikuti kegiatan BDF yang diselenggarakan oleh Indonesia telah menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut penting bagi Myanmar. IPD sebagai salah satu *think tank* Indonesia, memiliki pengaruh terhadap tansisi demokrasi di Myanmar.

Institusi ini memperoleh kredibilitas politik dengan memberikan layanan bagi aktor-aktor negara dan non-negara. *Think tank* menanggapi permintaan akan penelitian dan analisis, ide, dan argumentasi yang berkualitas tinggi dan layak. Selain itu, mereka menyediakan jasa seperti pelatihan etika atau kebijakan bagi pegawai negeri sipil, atau dengan mengadakan konferensi atau seminar. Bagi pemerintah yang peduli dengan kebijakan berbasis bukti, *think tank* berpotensi membantu menciptakan proses kebijakan yang lebih rasional dengan menambah kapasitas penelitian dalam tubuh pemerintahan, menghindari

⁴¹ Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2012. *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Hal: 195.

kendala waktu dan kelembagaan, dan mengingatkan elit akan kondisi kebijakan yang berubah. Dengan demikian, adalah mungkin bahwa *think tank* mempunyai dampak bagi pemerintah dan lebih mungkin lagi bahwa pemerintah atau pemimpin politik tertentu menggunakan organisasi ini sebagai alat untuk mengejar kepentingan mereka sendiri dan menyediakan legitimasi intelektual bagi kebijakan.⁴²

IPD bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil Myanmar dalam merancang dan melaksanakan program pengembangan peningkatan kapasitas di negara Myanmar. IPD telah menjadi sebuah institusi untuk berbagi pandangan konstruktif, ide dan pelajaran demokrasi tanpa penilaian atau pemaksaan di Myanmar. Hal ini berarti bahwa IPD telah menebarkankan benih-benih demokrasi serta memberikan penanaman nilai-nilai demokrasi kepada Myanmar melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan.⁴³

Keberadaan IPD sebagai suatu institusi dan lembaga *think-tank* Indonesia, telah menunjukkan eksistensi Indonesia di ranah internasional. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia merupakan kegiatan diplomasi Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Myanmar tanpa menggunakan kekerasan dan menimbulkan instabilitas politik. Meskipun telah dilaksanakan berbagai kerjasama antara IPD dengan Myanmar terkait demokrasi, namun penulis melihat bahwa IPD kurang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Myanmar atau dapat dikatakan bahwa hasil kerjasama tersebut kurang efektif sehingga tidak memberikan dampak yang besar bagi Myanmar.

Meskipun tumbuh secara luas, *think tank* tidak menikmati akses politik otomatis. Mencoba untuk memfasilitasi analisis kebijakan bagi para pembuat

⁴² Frank Fischer. 2015. *Handbook Analisis Kebijakan Publik*. (Bandung: Nusa Media). Hal: 217.

⁴³ <http://old.setkab.go.id/berita-10969-institutperdamaian-dan-demokrasi-dari-bali-untukdunia.html>, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2017 pukul 09:41 wita.

keputusan tidak sama dengan dampak kebijakan langsung pada undang-undang yang akan diterbitkan atau pemikiran eksekutif. Relatif sedikit *think tank* memberi sumbangan kunci untuk pengambilan keputusan dalam forum-forum lokal, nasional, atau global regional, atau mempunyai pengaruh paradigmatik atas pemikiran kebijakan. Sebuah survei empiris menunjukkan bahwa sektor *think tank* dalam pembuatan kebijakan Uni Eropa mengkritik relatif kurangnya kekuatan dan kemampuan mereka untuk memberikan nilai tambah, kadang-kadang kurangnya dampak dan relevansi mereka dan terakhir pendekatannya dipandang sebagai terlalu teknokratik dan elitis.⁴⁴

Keefektifan atau pengaruh dari suatu institusi seperti IPD, bukan hanya dapat dilihat dari seberapa baik program tersebut dibuat dan dijalankan, namun juga bagaimana penerimaan atau respon dari Myanmar sebagai aktor utama yang sangat menentukan keberhasilan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Meskipun telah dilaksanakan berbagai kegiatan oleh IPD dalam mempromosikan demokrasi di Myanmar, namun hasil akhir dari kegiatan tersebut dikembalikan lagi kepada Myanmar. Indonesia melalui IPD kurang dapat memberikan pengaruh langsung terhadap perubahan kebijakan di Myanmar, sebab pada hakikatnya BDF dan IPD mengedepankan diplomasi tanpa menggunakan cara kekerasan dan paksaan. Sehingga meskipun IPD dan lembaga terkait di Myanmar telah melakukan kerjasama dalam pengembangan demokrasi, masih terdapat nilai-nilai demokrasi yang fundamental kurang dapat diimplementasikan di Myanmar.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan dunia hingga saat ini adalah pembantaian terhadap etnis minoritas di Myanmar, yakni etnis Muslim Rohingya. Kuatnya dominasi junta militer hingga saat ini merupakan salah satu faktor yang menghambat laju perkembangan demokrasi di Myanmar. Hal ini menjadi bukti

⁴⁴ Frank Fischer. *Op.Cit.* Hal: 216.

nyata dari rendahnya penerapan demokrasi di Myanmar dan menunjukkan bahwa demokrasi yang berjalan tidak menyentuh nilai-nilai fundamental, seperti pembangunan masyarakat yang rukun dan penerimaan terhadap keberagaman.⁴⁵ Masalah kebebasan dan perlindungan terhadap warga negaranya adalah salah satu nilai-nilai dalam demokrasi. Namun, dalam kenyataannya di Myanmar masalah ini yang justru membuat demokrasi di Myanmar semakin melemah.

Etnis Rohingya merupakan etnis minoritas di Myanmar. Hal tersebut menimbulkan sikap diskriminasi terhadap etnis Rohingya bahkan hingga status *stateless*. Hingga saat ini isu tentang pembersihan etnis Rohingya masih menjadi perhatian dunia. Terdapat berbagai bentuk-bentuk diskriminasi terhadap etnis Rohingya. Pada pemilu 2015, pemerintah junta militer menghilangkan hak pilih sekitar 1,3 juta warga Rohingya setelah didemo para biksu garis keras. Kini, warga Rohingnya tak lagi dianggap warga negara penuh, dan tak memiliki hak konstitusional sebagai warga negara termasuk hak pilih.⁴⁶

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry juga memiliki penilaian tentang pemilu Myanmar. Hilangnya hak pilih Muslim Rohingya, dan banyaknya calon legislatif yang didiskualifikasi karena alasan kewarganegaraan, merupakan penyebab pemerintah AS menilai pemilu Myanmar jauh dari sempurna.⁴⁷

Meskipun telah dilaksanakan kerjasama antara IPD dengan Myanmar khususnya dalam pengembangan demokrasi, namun dalam kenyataannya masih terdapat nilai-nilai demokrasi yang kurang diimplementasikan di Myanmar. Padahal telah dilaksanakan seminar yang bertajuk demokrasi, pelatihan kepada

⁴⁵ Aghisna Kumala Tunjung Sari. 2014. *Pengaruh Kebijakan Constructive Engagement ASEAN terhadap Demokratisasi di Myanmar*. Universitas Brawijaya Malang. Hal: 6.

⁴⁶ <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/11/16/nxwjsq-pemilu-paling-pilu-bagi-rohingya>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017 pukul 14.55 wita.

⁴⁷ *Ibid.*

lembaga-lembaga pengembangan demokrasi serta melalui kegiatan BDF pula Myanmar turut serta dan berkomitmen dalam mengembangkan demokrasi. Implementasi dari kegiatan tersebut mengalami berbagai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya.

Sejauh ini, Indonesia melalui forum BDF serta terbentuknya IPD tampaknya belum terlalu berperan dalam pengembangan demokrasi di Myanmar. Hal ini dapat dimaklumi jika kita memahami bahwa demokrasi bukanlah sebuah ideologi yang dapat langsung diterapkan disuatu negara tetapi membutuhkan waktu dan proses untuk beradaptasi dengan berbagai aspek kehidupan. Sebuah negara tidak dapat memaksakan sebuah ideologi agar bisa sama diterapkan dinegara lain, karena bisa jadi terdapat suatu ideologi yang cocok disuatu negara tetapi belum tentu cocok untuk diterapkan dinegara lain.

Upaya Indonesia dalam membantu pengembangan demokrasi di Myanmar, menggunakan cara-cara diplomatis tanpa harus terlibat langsung dan terlalu mencampuri urusan dalam negeri Myanmar terhadap berbagai masalah yang sudah menjadi bagian dari kedaulatan masing-masing negara. Maka untuk itulah pendekatan diplomatis digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam mencapai hal tersebut maka Indonesia perlu berhati-hati dalam mengambil langkah agar dapat mendekati Myanmar. Dengan berbagai konflik khususnya tentang etnis Rohingya, Indonesia berusaha melakukan pendekatan dengan Myanmar tanpa harus menjauhi atau melakukan intervensi yang justru dapat menimbulkan ketegangan antar dua negara.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Indonesia saat ini dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Hal ini tidak terlepas dari upaya Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi. Indonesia pernah dipimpin oleh pemerintah yang diktator selama puluhan tahun, namun karena adanya berbagai tekanan dari berbagai pihak akhirnya Indonesia mulai menerapkan nilai-nilai demokrasi. Hingga saat ini, Indonesia menjadi acuan bagi negara lain yang juga sedang memasuki alam demokrasi.

Myanmar pernah dikenal sebagai negara yang anti demokrasi dan tertutup. Pemerintahan yang dianut oleh Myanmar adalah junta militer selama hampir 50 tahun. Namun, Myanmar mulai menampakkan perkembangan untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi dengan dilangsungkannya kegiatan pemilu pada tahun 2010. Ini menunjukkan bahwa ideologi demokrasi mulai dianut oleh Myanmar, meskipun belum seutuhnya. Hal ini terjadi karena pengaruh militer yang masih kuat di Myanmar. Contohnya saja masalah kasus Rohingya yang menjadi isu internasional dan dianggap telah mencederai nilai-nilai demokrasi di Myanmar.

Saat ini, Indonesia telah menjadi contoh dalam penerapan demokrasi bagi negara yang baru saja atau akan menerapkan ideologi demokrasi. Indonesia adalah salah satu negara dapat dikatakan telah berhasil menerapkan nilai-nilai demokrasi di negaranya. Citra Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar digunakan sebagai kekuatan Indonesia untuk melakukan kegiatan diplomasi publik. Dalam upaya membantu Myanmar untuk melewati transisi politik serta pengembangan demokrasi, Indonesia menggunakan cara-cara

diplomatis untuk mencapai tujuannya dalam menebarkan nilai-nilai demokrasi. Upaya yang dilakukan Indonesia dalam promosi demokrasi serta pengembangan demokrasi adalah melalui kegiatan *Bali Democracy Forum* (BDF) dan *Institute for Peace and Democracy* (IPD).

Bali Democracy Forum (BDF) merupakan forum bertukar pendapat atau pengalaman serta forum diskusi yang diprakarsai oleh Indonesia untuk mempromosikan demokrasi diantara negara-negara kawasan Asia. BDF merupakan acara tahunan yang dilaksanakan oleh Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri Indonesia sejak tahun 2008 dan terakhir dilaksanakan pada tahun 2016 di Nusa Dua, Bali. Melalui kegiatan inilah Indonesia mempromosikan demokrasi khususnya kepada Myanmar sehingga dapat membantu Myanmar dalam pengembangan demokrasi. Banyak negara yang antusias mengikuti kegiatan ini sebab forum ini tidak berupaya memaksa negara lain untuk mengikuti Indonesia, tetapi melalui pemahaman secara mendalam mengenai demokrasi.

Dalam kegiatan BDF ini, Indonesia memiliki peran diplomasi yang cukup besar yaitu berperan sebagai inisiator, mediator, serta integrator. Inisiator berarti kegiatan BDF ini merupakan inisiatif dari Indonesia untuk mendukung dan mempromosikan demokrasi. Peran Indonesia sebagai mediator dalam forum ini adalah sebagai pihak yang mempertemukan berbagai perwakilan pemangku kepentingan untuk mendengarkan keprihatinan satu sama lain, untuk belajar tentang situasi lingkungan, dan untuk menegosiasikan kesepakatan konsesus mengenai rencana tindakan selanjutnya yang dapat mereka implementasikan. Selain itu, Indonesia juga berperan sebagai integrator dalam kegiatan BDF yang menjadi penghubung negara-negara peserta untuk menjalin kerjasama terkait pengembangan demokrasi.

Myanmar adalah negara peserta BDF yang selalu turut aktif berpartisipasi dalam forum yang diselenggarakan oleh Indonesia tersebut. Myanmar yang selama ini terkenal dengan sikapnya yang anti demokrasi serta tertutup dari dunia Internasional, mengambil keputusan untuk turut aktif dalam forum demokrasi terbesar di Asia. Dalam forum BDF, akan menghasilkan *chairman statements* yang merupakan komitmen dari negara-negara peserta. Hal tersebut menunjukkan bahwa Myanmar sebagai negara peserta kegiatan BDF berkomitmen untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Selain menghasilkan *chairman statements*, BDF juga telah mendirikan sebuah Institusi yang disebut *institute for Peace and democracy* (IPD).

IPD merupakan tindak lanjut dari kegiatan BDF yang menjalankan program-program yang dihasilkan dari forum BDF dan menjamin keberlanjutan dalam menyelenggarakan kegiatan berkala BDF. Institusi ini didirikan pada tahun 2008 oleh Indonesia dan menjalankan program-program terkait promosi demokrasi dengan negara lain. Upaya diplomasi IPD dalam mengembangkan demokrasi, maka kewenangan yang dimiliki oleh IPD adalah melaksanakan pertukaran pengalaman atau intelektual (*intellectual exchange*), pelatihan (*training*), *joint mission*, *election visit*, serta membangun jaringan.

Myanmar adalah salah satu negara yang bekerjasama dengan IPD dalam mempromosikan dan mengembangkan. Berdasarkan mandat dari IPD, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IPD yang bekerjasama dengan Myanmar adalah melaksanakan dialog, program pemberdayaan pengawas pemilu Myanmar, pelatihan kepada jurnalis Myanmar, serta membangun jaringan kerjasama dengan Myanmar Development and Research Institute (MDRI). Upaya-upaya yang dilakukan tersebut merupakan cara-cara diplomatis Indonesia melalui IPD untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi kepada Myanmar. adalah salah satu bentuk diplomasi Indonesia dengan menggunakan

jalur kelima. Dalam diplomasi multijalur, kegiatan diplomasi bukan hanya menjadi tugas dan fokus dari pemerintah, tetapi terdapat sembilan jalur untuk menjalankan kegiatan diplomasi. Salah satunya pada jalur kelima, untuk menciptakan perdamaian dapat diperoleh dengan cara melakukan kerjasama dalam hal pendidikan, penelitian, pelatihan serta melaksanakan forum-forum internasional.

IPD menjadi sebuah lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Myanmar terkait masalah demokrasi dan meyakini bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tersebut dapat memberikan manfaat bagi Myanmar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud merupakan kerjasama antara IPD dengan pemerintah Myanmar serta lembaga-lembaga di Myanmar.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia khususnya IPD dalam promosi dan pengembangan demokrasi di Myanmar, memberikan pengaruh terhadap Myanmar. Pengaruh tersebut dari kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan oleh IPD seperti seminar, dialog serta pelatihan. Hal ini membuat Myanmar ingin terus belajar dengan Indonesia mengenai demokrasi. Dari kegiatan yang dilakukan tersebut telah menebarkan nilai-nilai demokrasi kepada berbagai kalangan seperti pemerintah, institusi pemerintah, lembaga penelitian atau akademisi, politisi serta masyarakat Myanmar. Hal tersebut dapat dilihat dari antusiasme dan tingkat partisipasi masyarakat yang selalu meningkat dalam kegiatan pemilu.

Meskipun telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk mendorong demokrasi di Myanmar oleh IPD, namun kurang memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan kebijakan di Myanmar. Hal tersebut terjadi karena IPD sebagai *think tank* Indonesia tidak menikmati akses politik otomatis sehingga tidak memberikan dampak langsung terhadap kebijakan dan pemikiran eksekutif. Contohnya dalam kasus Rohingya yang dianggap telah mencederai

nilai-nilai demokrasi di Myanmar. Diskriminasi terhadap etnis Rohingya masih terjadi di Myanmar, hal ini dapat dilihat dari diingkannya hak pilih warga Rohingya oleh junta militer pada pemilu 2015 serta pelanggaran HAM yang masih terjadi pada etnis Rohingya yang dilakukan oleh militer Myanmar. Meskipun Myanmar telah menganut ideologi demokrasi, namun pengaruh militer di Myanmar masih cukup kuat, dan inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan demokrasi di Myanmar.

5.2 Saran

Demokrasi bukanlah suatu hal yang bisa dipaksakan dari luar. Demokrasi perlu untuk sesuai dengan nilai-nilai lokal suatu masyarakat, untuk dapat diterapkan di masyarakat tersebut. Maka untuk itulah Indonesia melakukan upaya-upaya diplomatis untuk mendorong demokrasi di Myanmar. Meskipun upaya tersebut telah memberikan pengetahuan tentang demokrasi kepada Myanmar namun kurang berdampak terhadap pengambilan kebijakan atau keputusan di Myanmar.

Indonesia dalam mendorong demokrasi di Myanmar seharusnya tetap melanjutkan kegiatan seperti BDF dan IPD. Sebab, untuk mengajak negara lain untuk menganut sebuah ideologi membutuhkan waktu dan penyesuaian untuk memahami sebuah ideologi secara mendalam. BDF dan IPD inilah yang menjadi salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, dengan tetap berlanjutnya kegiatan tersebut juga akan semakin membuat citra Indonesia semakin baik dan dapat berkontribusi bagi duni internasional.

Mendorong Myanmar untuk mengembangkan demokrasi bukanlah perkara yang mudah bagi Indonesia. Agar demokrasi tetap berjalan dengan baik di Myanmar, Indonesia perlu lebih memperkuat diplomasi atau pendekatan dengan pemerintah Myanmar. Indonesia seharusnya lebih mendorong Myanmar

tanpa harus mengintervensi kedaulatan Myanmar. Serta diplomasi yang kuat juga perlu dilakukan oleh IPD sebagai lembaga *think tank* Indonesia agar kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan dapat memberikan dampak secara langsung terhadap kebijakan Myanmar. Dengan semakin kuatnya diplomasi Indonesia maka akan semakin membuat hubungan bilateral Indonesia-Myanmar juga semakin kuat.

Keefektifan atau pengaruh dari suatu institusi seperti IPD dan forum BDF, bukan hanya dapat dilihat dari seberapa baik program tersebut dibuat dan dijalankan, namun juga bagaimana penerimaan atau respon dari Myanmar sebagai aktor utama yang sangat menentukan keberhasilan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Maka, penulis menyarankan agar kiranya kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan secara prosedural tetapi ditindak lanjuti seperti mengimplementasikan hasil dari kegiatan tersebut. Pemerintah Myanmar seharusnya menjadikan forum BDF ini sebagai forum bertukar informasi secara sungguh-sungguh khususnya hal-hal yang berhubungan dengan pluralisme dan HAM. Selain itu, penulis merekomendasikan agar IPD dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Myanmar dalam pengambilan sebuah kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bakry, Umar Suryadi. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burhan, Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Sidoarjo: Airlangga University Press.
- Cipto, Bambang. 2006. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djelantik, Sukawarsini. 2004. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fischer, Frank. 2015. *Handbook Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2012. *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Perwita, Anak Agung Banyu. 2014. *Kajian Konflik dan Perdamaian*. Cikarang: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Taupan, M. 1989. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Veronique, Dudouet dan Dressler Matteo. 2016. *From Power Mediation to Dialogue Facilitation: Assessing The European Union's Approach to Multi-Track Diplomacy*. (Jerman: Berghof Foundation). (Pdf)

Jurnal:

- Hidriyah, Sita. 2011. Proses Demokratisasi Myanmar Menuju Pemilu Presiden Tahun 2012. *Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol.III, No. 24.
- Kurniawan, Gadug. 2015. Kebebasan sebagai Hakekat Demokrasi. *Jurnal Inovatif*, Vol. VIII, No. 1.
- Muhamad, Simela Victor. 2010. Harapan Atas Peran ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dalam Mendorong Berkembangnya Demokratisasi di Myanmar. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Volume 15, No.2.
- Nilasari, Yolanda Utami. 2014. Proses Perubahan Politik di Myanmar: Menuju Demokrasi Melalui Pemilu. *Pengembangan Ilmu Sosial-FORUM Universitas Diponegoro*, Vol.41, No.1.

Sidauruk, Wilson Rojeki. Institute for Peace and Democracy (IPD) dalam Demokratisasi di Myanmar. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, (Online), Volume 2 No.1.

Widiyanta, Danar. 2016. Peran Indonesia dalam Mewujudkan Demokratisasi di ASEAN. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. VIII, No. 1.

Wiranata, I Made Anom. 2014. Politik Luar Negeri Indonesia dalam Mempromosikan Demokrasi di ASEAN. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, (Online), Vol. V, No. 1.

Skripsi:

Arif, Melisa Aprianti. *Analisis Demokratisasi di Myanmar Tahun 2003-2011*. <http://scholar.unand.ac.id/8844/4/BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>, Diakses pada tanggal 28 April 2017.

Choirunisa, Farida. *Peranan Aung San Suu Kyi dalam Masa Transisi Politik di Myanmar*. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=84412&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html, diakses pada tanggal 28 April 2017.

Diani, Mahyar. Skripsi. *“Strategi Multi Track Diplomacy Dalam Kerjasama Ekonomi Industri Korea Selatan (ROK) Terhadap Indonesia Tahun 2006-2012”*.(Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah).

Paskarina, Caroline. *Politik Indeks dan Arah Perkembangan Demokrasi di Indonesia*. https://www.researchgate.net/publication/311225925_POLITIK_INDEKS_DAN_ARAH_PERKEMBANGAN_DEMOKRASI_DI_INDONESIA, diakses pada tanggal 19 April 2017.

Puspita, Adya Satya. 2013. *Keikutsertaan Myanmar dalam Kegiatan Bali democracy forum (BDF)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Prasetyo, Eko. 2013. *Demokrasi dan Problem Kepemimpinan Politik di Indonesia*. Jakarta: Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24118/1/EKO%20PRASETYO.pdf>, Diakses 10 April 2017.

Sari, Aghisna Kumala Tanjung. 2014. *Pengaruh Kebijakan Constructive Engagement ASEAN terhadap Demokratisasi di Myanmar*. Universitas Brawijaya Malang.

Seta, Mochamad Arya. *Multi-track Diplomacy*. Diakses dari http://mochamad-arya-seta-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-155925-SOH203%20Negosiasi%20dan%20Diplomasi-Multitrack%20Diplomasi.html. Pada tanggal 15 April 2017.

Dokumen:

Direktorat Informasi dan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2013. *Diplomasi Indonesia 2013: Fakta dan Angka*.

Situs Internet:

Anonim. *Obama Puji Demokrasi Indonesia*. <http://www.dw.com/id/obama-puji-demokrasi-indonesia/a-17804884>. Diakses pada tanggal 19 April 2017.

Anonim. *Obama Puji Demokrasi Indonesia*. <http://www.dw.com/id/obama-puji-demokrasi-indonesia/a-17804884>. Diakses pada tanggal 19 April 2017.

Anonim. *Bali Democracy Forum*. <http://www.setneg.go.id>. Diakses pada tanggal 13 April 2017.

Anonim. <https://www.slideshare.net/DadangSolihin/2013-042-lemhannas>. *Membangun Lembaga Think Tanks*. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2017.

Lubyanti, Rilia Tamara. *Peran Indonesia dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia*. https://www.academia.edu/22022483/PERAN_INDONESIA_DALAM_UPAYA_MENCIPTAKAN_PERDAMAIAN_DUNIA. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2017

<http://scholar.unand.ac.id/8844/4/BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>, Diakses pada tanggal 28 April 2017.

<http://imtd.org/multi-track-diplomacy>. Diakses pada tanggal 19 April 2017.

<https://www.iapc.org/>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2017.

<http://www.ipd.or.id/bdf/bali-democracy-forum-i>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2017.

<http://www.ipd.or.id/friends-of-ipd>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2017.

<http://www.ipd.or.id/ipd-team>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2017.

<https://www.scribd.com/document/102810816/Compile-BDF>. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2017

<http://bali.kpu.go.id/?pg=beritadetail&id=329>. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2017.

<http://old.setkab.go.id/berita-10969-institutperdamaian-dan-demokrasi-dari-bali-untukdunia.html>, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2017.

<http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/11/16/nxwjsq-pemilu-paling-pilu-bagi-rohingya>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017.

IMTD. *imtd.org/multi-track-diplomacy*. Diakses pada tanggal 19 April 2017.

Institute for Peace and Democracy. *Comprehensive Program Report*.
<http://www.ipd.or.id/comprehensive-program-report>, pada tanggal 12 Agustus 2017.